ECONOMIC DEVELOPMENT
INCOME - REGIONAL DISPARITIES
ADLN - Perpustakaan Unair

ANALISIS KONTRIBUSI SISI PENERIMAAN DAN SISI PENGELUARAN APBD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA PERIODE 1994-2004

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

C. 68/06
Ern
a

DIAJUKAN OLEH
ERNAWATI
No. Pokok : 040217411

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI SISI PENERIMAAN DAN SISI PENGELUARAN APBD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA PERIODE 1994-2004

DIAJUKAN OLEH

ERNAWATI

No. Pokok : 040217411

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

Drs.Ec. SUKARNOTO **TANGGAL** 18-9-'06

KETUA PROGRAM STUDI,

Dra.Ec.Hj. SRI KUSRENI, M.si **TANGGAL** 22-09-2006

Surabaya,……1 AGUSTUS 2006……..

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

Drs.EC SOEKARNOTO

Ibu, sungguh hangat sinaran kasih sayangmu...sehangat sinaran mentari dipagi hari
Ibu, sungguh sejuk tutur katamu..... sesejuk embun di pagi hari
Ibu sungguh manis senyumnu.....semanis madu yang menyegarkan raga
Ibu perjuanganmu demi anakmu- anakmu..... setegar batu karang

Ibu engkulah semangat hidupku
Ibu engkau bagai jiwa kedua bagiku
Ibu anakmu belum sanggup hidup tanpa belaianmu
Ibu belum dapat aku membalas jasa-jasamu
Ya Allah ya Robbi
Izinkan aku menberi setitik kebahagiann untuk ibundaku
Izinkan aku mempersembahkan baktikku untuk ibundaku
Izinkan aku membuat ibundaku tersenyum sepanjangmasa
Amien ..amien ..amien

Skripsi ini saya persembahkan untuk ibunda tercinta Nani SM Spd.serta ayahandaBpk Sujoko.Serta mas Duddy Adriyanto SE dan adikku Erwin Santosa.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahi rabbil'aalamiin, segala puji syukur atas kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul " ANALISIS KONTRIBUSI SISI PENERIMAAN DAN SISI PENGELUARAN APBD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA PERIODE 1994-2004" untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.

Selesainya penulisan ini tentunya tidak lepas dari banyak dukungan dan bantuan orang-orang disekitar penulis baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bpk Drs. Ec H. Karjadi Mintaroem, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Dra. Ec. Hj. Sri Kusreni, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
3. Ibu Dra. Ec. Hj. Siti Umajah Masjkuri, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
4. Bpk Drs. Ec Soekarnoto selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing penulis.
5. Bpk Ahmad Solihin, SE., Msi selaku dosen Ekonomi Publik yang turut meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan pada penulis.

6. Para Dosen Fakultas Ekonomi khususnya dosen Ekonomi Pembangunan yang telah membagi ilmunya kepada penulis dalam perkuliahan yang mengesankan.
7. Pimpinan dan seluruh staf ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
8. Untuk mas Dany dan mbak Nuning terima kasih banyak atas bantuannya.
9. Kedua Orang tuaku bpk Sujoko dan khususnya ibunda tercinta Nani SM Spd, yang penuh kasih memberikan semangat "***I Love u Mom***". Serta adikku Erwin Santosa dan kekasihnya Firli Rabayani yang banyak sekali membantu penulis.
10. Untuk Mas Duddy Adriyanto SE yang telah mendukung dan memberi semangat yang tak putus-putus, serta kesabarannya dalam menunggu kelulusan penulis. Terima kasih atas segalanya, semoga **Hari Indah** itu akan segera kita songsong dan jalani. Amien 3x,.
11. Letda Inf. Nur Said Mattaya terima kasih atas suportnya selama penulis menempuh pendidikan SMU dan perguruan tinggi hingga lulus pada akhirnya. Serta terima kasih atas jalinan persaudaran yang indah ini dan semoga tetap abadi dalam rangkulan.
12. Terima kasih kepada om dan bulikku, Drs H Nasir Susanto dan Hj Nur Hidayati atas dukungannya baik materiil dan spiritual. Semoga Allah SWT membalas kebaikan anda berdua.
13. Untuk semua prajurit TNI dimanapun kalian berada selamat berjuang menjaga keutuhan ibu pertiwi yang kita cintai.Tetap semangat mengemban

tugas negara nan mulia ini. Kalian adalah inspirasiku. Hidup TNI.... hidup TNI.

14. Teman-teman terbaikku : Sudartik SE (akhire aku isok lulus tik), Henny (ayo semangat biar bisa wisuda bareng), V-3(suwun yo dukungane, aku ojo ditokne saka kelompok cabidut sing terkenal kuwi..he3x), Ratna Indra (makasih tumpangannya dan belajar barengnya), Qq (makacih atas tawa-tawa indah kita, nunutannya, belajar barengnya, thanx for everything), Dwi Ratna sari dan Puji (ayo kalian berdua semangat 45 ya, biar cpt selesai skripsinya), Linna (ojo cemberut wae, mugo-mugo cepet ketemu jodoh sing pas lahir batin), Happy (wo ai ni...buat semua bantuannya) dan Dian Tri, terima kasih atas Dukungannya.
15. Teman belajar kelompok : Verita Napitupulu SE, Yu Kwie, dan Dian Yulia Sari kalian sungguh berarti.
16. Teman-teman angkatan 2002: Darto (makasih ya tok kamu dah banyak membantu, kamu emang teman yang paling baik dan setia), Komaidi SE dan Priadi SE (terima kasih ya atas bantuannya selama ini, kalian sungguh membantu penulis), Nova SE, Fajar, Son Haji SE (makasih atas kasih semangat daftar sidangnya), Nugroho, Heru, Miko (tak enteni ning Nganjuk cah), Avianto, Adit, Intan, Martha, Sri Rahayu (teman senasib sepenanggungan dalam daftar sidang, akhirnya bisa lulus juga ya Sri), Novi Arissanti SE, Poppy SE, Nafi, Tina, Anggi, Gawang, Dani Krisna (makasih buat undang-undang otonomi daerahnya) dan semua yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

17. Kakak Kelas: Mas Rumaya (terima kasih atas bantuannya selama ini yang tak terhitung jumlahnya, smoga cepat dapet jodoh ya), Mas Prima, Mas Gagang, Mas Patris (ayo semangat..semangat), Mbak Timah (thanx jurnal dan contoh skripsinya), Mas Wirya, Mbak Ratih '01 (matur suwun pinjeman baju sidangnya) Tika, Mbak Mukti, Mbak Niken, Mbak Halida. Untuk Mbak Neri terima kasih atas semuanya.
18. Untuk adik kelas : Nuris '03, Nurul '03 dan Pipien '03 (thanx buat catetannya) serta Aero "03 (thanx buat referensi panel datanya)

Surabaya, Agustus 2006

ernawati

Penulis

ABSTRAK

Pertumbuhan GDP merupkan salah satu indikator yang digunakan untuk untuk menilai prestasi ekonomi pemerintahan suatu negara. Pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melaluikebijakan fiskal dan moneter. Namun implikasi kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan baik secara empiris maupun teoritis. Sehingga hal ini menjadi menarik dan penting untuk diteliti.

Tujuan utama Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui peran dan kontribusi sisi penerimaan dan sisi pengeluaran APBD terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia pada era sebelum dan sesudah Otonomi daerah (otoda) periode 1994-2004. Penelitian ini menggunakan data panel 26 provinsi di Indonesia dalam periode (1994-2004). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model FEM dan GLS.

Hasil estimasi dengan metode FEM dan GLS menemukan bahwa variabel sisi penerimaan dan sisi pengeluaran APBD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB pada era sebelum dan sesudah Otonomi daerah. Sisi pengeluaran APBD terbukti berpengaruh positif terhadap PDRB. Sedangkan variabel sisi penerimaan APBD berpengaruh negatif terhadap PDRB. Secara umum kontribusi positif sisi-sisi APBD terhadap PDRB mengalami penurunan pada masa Otonomi daerahdibandingkan sebelum Otonomi daerah.

Kata kunci : penerimaan APBD, pengeluaran APBD, pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

GDP growth is one of indicators which commonly use to evaluate the government economic achievement. The government can influence economic growth through fiscal and monetary policy. Eventhough the impact of fiscal policy to economc growth still debatable both teoriticaly and empirically. , this factors which makes this research in this issue important 7 interesting to be conducted.

The main object of this research are to analyze role and contribution revenue side and expenditure side of APBD to regional economic growth in Indonesia during period before and after Otonomi daerah (otoda)1994-2004. The data use in this research are panel data from 26 province in Indonesia during period 1994-2004. The method use is FEM and GLS.

The estimate result with FEM and GLS Method show that revenue side and expenditure side of APBD have positive and significant impact to PDRB in era before and after Otonomi daerah. Expenditure side ahe positive impact to PDRB. Revenue side have negative impact to PDRB. Generalize positive contribution APBD to PDRB decreasing in era Otonomi daerah comparing with in before Otoda.

Key words : *APBD revenue side, APBD expenditure side, economic growth*

DAFTAR ISI

	halaman
Kata pengantar	i
Abstraksi	v
Abstrac	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Manfaat Penelitian	6
1.5.Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Landasan Teori	9
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.2 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar	12
2.1.3 Intervensi Fungsi Pemerintah	17
2.1.4 Kebijakan Fiskal	19
2.1.5 APBN dan APBD	22
2.1.6 Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah	23
2.1.6.1 Penerimaan Pemerintah	23
2.1.6.2 Pengeluaran Pemerintah	28
2.1.7 Konsep Pemikiran Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal	32
2.2.Penelitian Sebelumnya	36
2.3.Hipotesis dan Model Analisis	40
2.3.1 Hipotesis	40
2.3.2 Model Analisis	41
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	42
3.2. Identifikasi Variabel	42
3.3. Definisi Operasional	42
3.4. Jenis dan Sumber Data	44
3.5. Prosedur Pengumpulan Data	44
3.6. Teknis Analisis Regresi Data Panel	45
3.6.1 Uji Statistik	47
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	49
BAB 4 PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian	51
4.1.1 Rasio PAD terhadap PDRB di Daerah Penelitian	51

4.1.2 Rasio Dana Alokasi Terhadap PDRB Di daerah penelitian 54
4.1.3 Rasio Pengeluaran Pembangunan terhadap PDRB di Daerah Penelitian 57
4.1.4 Rasio Pengeluaran Rutin terhadap PDRB di Daerah Penelitian 59
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 61
4.3. Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis 62
4.3.1. Analisis Model 62
4.3.1.1 Periode Sebelum Otoda (1994-2000) 65
4.3.1.2 Periode Sesudah Otoda (2001-2004) 66
4.3.2. Pembuktian Hipotesis 68
4.4. Pembahasan 68

BAB 5 Simpulan dan Saran
5.1. Simpulan 77
5.2. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1995-2003 (Kuartal I-IV) 3

Tabel 4.1.Rasio PAD Terhadap PDRB 26 Provinsi di Indonesia.....53

Tabel 4.2.Rasio Dana Alokasi Terhadap PDRB di Daerah Penelitian.....56

Tabel 4.3. Rasio Pengeluaran Pembangunan Terhadap PDRB.....58

Tabel 4.4. Rasio Pengeluaran Rutin Terhadap PDRB.....60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Regresi Model Awal

Lampiran 2. Regresi Modifikasi Model Awal

Lampiran 3. Regresi Model Final

Lampiran 4. Grafik Residual Observasi Cross-Section

Lampiran 5. Matriks Korelasi residual Observasi Cross-Section

Lampiran 6. Uji Beda Varians Residual Observasi Cross-Section

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi suatu negara dalam mencapai tujuan perekonomian : tingkat pendapatan nasional yang selalu meningkat, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil serta posisi neraca pembayaran yang seimbang. Untuk mencapai tujuan perekonomian tersebut diperlukan peranan pemerintah sebagai pengambil kebijakan di suatu negara dalam menerapkan kebijakan yang ditetapkan dalam perekonomian. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah kebijakan fiskal (instrumen penerimaan dan pengeluaran pemerintah).

Kebijakan fiskal dalam praktik kenegaraan di Indonesia merupakan keputusan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang penerimaan, pengeluaran, dan pinjaman yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengarahkan perekonomian Indonesia dalam mencapai tujuan yang ditetapkan (Arifin, 2005). APBN selaku piranti kebijakan fiskal senantiasa menjadi tumpuan untuk memulihkan stabilitas ekonomi makro dan mempertahankan pertumbuhan.

Prestasi ekonomi suatu negara melalui implementasi kebijakan yang ditetapkan pemerintah (dalam hal ini kebijakan fiskal) dapat dinilai dengan berbagai indikator yang dapat diukur melalui sebuah besaran dengan istilah pendapatan nasional. Pendapatan nasional memang bukan satu-satunya ukuran untuk prestasi ekonomi suatu negara, namun cukup representatif dan dapat

digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Istilah pendapatan nasional dapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB). Istilah yang sebaiknya digunakan adalah Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto untuk pembahasan regional, karena konsep ini menggambarkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh produksi di dalam kawasan sebuah sebuah negara atau daerah. Produk Domestik Bruto menggambarkan kenaikan produksi nasional yang benar-benar berlaku dalam negara tersebut (Sukirno, 2000 : 56)

Pembahasan di dalam penelitian ini menggunakan salah satu indikasi dalam pembangunan ekonomi, yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang (Boediono,1992 : 9). Dalam pengertian tersebut terdapat tiga aspek penekanan yaitu aspek pertama adalah suatu proses, jadi bukan gambaran ekonomi pada suatu saat tapi perekonomian berkembang atau berubah dari satu waktu ke waktu. Aspek kedua, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output perkapita. Ada dua sisi yang diperhatikan , yaitu sisi *output* totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Aspek ketiga yang menyangkut perspektif jangka panjang. Pengertian jangka panjang bukanlah kenaikan output perkapita selama setahun atau dua tahun yang kemudian diikuti dengan penurunan *output* per kapita, melainkan meliputi waktu yang lebih lama dalam kenaikan *output* per kapita.

Sebelum terjadi krisis ekonomi pada bulan juli tahun 1997, pertumbuhan ekonomi indonesia setiap kuartalnya mencapai angka yang signifikan yaitu antara 0,31% sampai dengan 5,77%. Walaupun sempat mengalami penurunan pada

kuartal I tahun 1996 sebesar -0,17%. Pada saat krisis ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai merangkak naik walaupun beberapa kuartal sempat mengalami penurunan, namun secara kumulatif, setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang signifikan.

TABEL 1.1

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
PERIODE 1995 – 2003 (KUARTAL 1 – KUARTAL IV)

Tahun	Mar.	Jun.	Sep.	Dec.
1995	2.88	1.88	4.02	0.31
1996	-0.17	2.47	5.77	0.8
1997	-2.57	0.57	5.65	-2.1
1998	-7.95	-12.51	3.75	-3.82
1999	4.25	-1.05	2.92	-1.51
2000	2.89	0.24	2.84	0.29
2001	1.01	0.22	2.13	-2.25
2002	2.17	1.87	2.65	-3.24
2003	-2.71	6.54	2.59	-2.86

Sumber : BPS, Buletin Statistk Bulanan Indikator Ekonomi, Beberapa Edisi

Implikasi dari kebijakan fiskal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi memang masih banyak diperdebatkan baik dari sisi teori maupun studi empirisnya yang juga masih terus berkembang. Pada awalnya yang lebih diperhatikan adalah kuantitas pengeluaran pemerintah, namun pada tahap selanjutnya aspek-aspek lain dari kebijakan fiskal pemerintah tersebut dirasa perlu pula untuk diamati. Selain efektifitas atau efisiensi dari pengeluaran pemerintah baik besarannya (*size*) dan alokasi sektoralnya, dampak dari cara pemerintah dalam membiayai pengeluarannya terhadap pertumbuhan ekonomi juga merupakan area studi yang menarik. Seperti disebutkan oleh Aschauer (2000), persoalan kebijakan fiskal

pemerintah mencakup "*how much you have*", "*how you pay for it*" dan "*how you use it*".

Selain *cross-countries studies* seperti Baffes dan Shah (1998), Desus dan Herrera (2000), Aschauer (2000), Gupta et al. (2002),hubungan antara kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah di suatu negara juga telah mendapatkan perhatian. Hal terakhir ini misalnya studi Rappaport (1999) dengan kasus Amerika Serikat, Bergstrom (1998) dengan kasus Swedia, Lall dan Yilmaz (2000) dengan kasus Amerika Serikat.

Brata dan Arifin (2003) juga telah mencoba menganalisis aspek fiskal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi di Indonesia. Namun, seperti juga kecenderungan studi-studi yang telah dikemukakan di atas, aspek fiskal yang diamati belum mencakup sisi penerimaan maupun komposisinya tetapi baru pada sisi pengeluaran khususnya pengeluaran pembangunan sebagai proksi dari investasi sektor publik lokal. Sementara itu aspek penerimaan pemerintah daerah merupakan salah satu isu krusial bagi Indonesia. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah tahun 1999, pemerintah daerah baik tingkat provinsi (Dati I) maupun kabupaten/kota (Dati II) lebih banyak tergantung pada pemerintah pusat (Kuncoro, 1995). Dalam hal ini, andil subsidi dari pemerintah pusat dalam struktur penerimaan pemerintah daerah sangat tinggi, jauh melebihi Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini ditujukan untuk mengetahui implikasi komposisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah (PemdaTingkat I) terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Studi ini diharapkan

dapat menambah kajian empiris mengenai implikasi kebijakan fiskal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi setidaknya karena masih terbatasnya studi empiris mengenai tema tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi sisi pengeluaran APBD (Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan) terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia?
2. Seberapa besar kontribusi sisi penerimaan APBD (Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah) terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia?
3. Apakah terdapat perbedaan kontribusi sisi peneriman dan sisi pengeluaran dalam APBD terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia pada periode sebelum dan pada era Otonomi Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kontribusi sisi pengeluaran APBD (Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan) terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kontribusi sisi penerimaan APBD (Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah) terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

3. Untuk mengetahui perbedaan kontribusi sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dalam APBD terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia pada periode sebelum dan pada era Otonomi Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aplikasi teori dan konsep ilmu ekonomi publik terutama dalam konteks otonomi daerah yang saat ini cenderung dilihat dari sudut pandang regional perwilayahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pelaku ekonomi dengan memberikan gambaran mengenai respon pertumbuhan ekonomi di daerah terhadap kebijakan fiskal regional sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonominya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan oleh pemerintah daerah sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi regioanl.

1.5. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab 2 : **Tinjauan Pustaka**

Dalam bagian ini akan diuraikan konsep dan teori mengenai kebijakan kebijakan fiskal regional. Pada bagian ini juga akan memaparkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya diuraikan pula model analisis yang akan digunakan serta hipotesis berdasarkan latar belakang masalah dan teori yang relevan.

Bab 3 : **Metode Penelitian**

Pada bab ini dikemukakan mengenai pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Bab 4 : **Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini akan dibahas secara rinci mengenai analisa data-data yang digunakan dalam penelitian, pembahasan mengenai analisa menggunakan metode data panel disertai dengan penghitungan dan pembuktiannya. Pada bab ini juga akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berdasarkan hasil penghitungan dan landasan teori yang relevan.

Bab 5 : **Simpulan dan Saran**

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan penulis sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, sesuai dengan hasil yang

ditemukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan dapat berguna.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut para ahli ekonomi memiliki beberapa definisi yang sebenarnya sama tapi berbeda menurut sisi para ahli memandangnya dari berbagai segi, antara lain menurut Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Jhingan, 2004 : 57). Prof. Kuznets dalam analisisnya yang panjang lebar, mengemukakan 6 karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan *output* per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi
4. Tingkat trasnformasi sosial dan ideologi yang tinggi
5. Adanya kecenderungan negara – negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian – bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku.

6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

Sejalan dengan Prof. Kuznets, menurut Boediono (1992 : 9) bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian tersebut, terdapat tiga aspek penekanan yaitu proses, *output* per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu "proses", jadi bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat saja, tetapi perekonomian yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Aspek yang kedua, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan *output* per kapita. Dari sini jelas bahwa ada dua sisi yang diperhatikan, yaitu sisi *output* totalnya (*Gross Domestic Product*) dan sisi jumlah penduduk. Aspek yang ketiga menyangkut perspektif waktu jangka panjang. Pengertian jangka panjang bukanlah kenaikan *output* per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan *output* per kapita, melainkan meliputi waktu yang lebih lama dalam kenaikan *output* per kapita.

Menurut pemikir Neo Keynes dan Neo Klasik, definisi pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Djoyohadikusumo,1995 : 30), sedangkan menurut Samuelson dan W. Nordhaus, pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial atau *output* nasional negara, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi terjadi apabila batas kemungkinan produksi (*Product Possibility Frontier*/PPF) bangsa bergeser ke luar.

Menurut Prof. W. A. Lewis, "pendorong utama pertumbuhan ekonomi ialah : upaya untuk berhemat (ekonomis), peningkatan pengetahuan dan penerapannya di bidang produksi, dan peningkatan jumlah modal dan sumber lain per kepala". Akan tetapi karena pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan "kekayaan manusia, sikap sosial, dan latar sejarah" maka Prof. Craicross dengan tepat menyatakan: "Pembangunan bukanlah sekedar masalah memiliki sejumlah mata uang atau semata – mata fenomena ekonomi. Ia mencakup semua aspek perilaku masyarakat, penegakan hukum, dan ketertiban, dan sebagainya" (Jhingan, 2004 : 41).

Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah :

1. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal/SDM.
2. Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi (Todaro, 2000 : 137)

Bahwasanya sumber kemajuan ekonomi bisa meliputi berbagai macam faktor, akan tetapi secara umum dapat dibedakan bahwa sumber-sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal/SDM dan fisik yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Di sini batas kemungkinan produksi dapat digunakan secara luas untuk menganalisis pilihan-pilihan produksi yang tersedia dalam suatu

perekonomian, memahami implikasi-implikasinya terhadap tingkat output dan "biaya oportunitas" (*oppornutiny cost*) atas adanya sebagian sumber daya secara tidak optimal (di bawah kapasitas sesungguhnya), dan sekaligus mengamati dampak-dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari meningkatnya penawaran SDA dan peningkatan teknologi (Todaro, 2000 : 143).

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh dua orang ahli ekonomi setelah Keynes yaitu Evsey Domar dari Massachusetts Institute of Tecnology dan Sir Roy F. Harrod dari Oxford University. Evsey Domar mengemukakan teori tersebut pada tahun 1947 dalam *American Economic Review* dan Sir Roy F.Harrod mengemukakan teori tersebut pada tahun 1939 dalam *Economic Journal*. Harrod dan Domar tertarik untuk mencari tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperlukan bagi kehidupan perekonomian untuk berjalan mulus dan tidak tersendat-sendat. Kendati model mereka berbeda dalam rincian, namun keduanya nyaris sampai pada kesimpulan yang sama.

Menurut Djojohadikusumo (1995 : 38), pokok perhatian Harrod berkisar pada pertumbuhan ekonomi yang dapat berlangsung secara terus-menerus dalam pola keadaan ekuilibrium yang stabil. Harrod memaparkan dua konsep pengertian mengenai laju pertumbuhan yang menjadi kunci gagasannya, yaitu (1) laju pertumbuhan produksi dan pendapatan pada tingkat yang dianggap memadai dari sudut pandang para pengusaha/calon investor. Hal ini disebut sebagai *the warranted rate of growth.* Selain itu juga ditunjukkan adanya (2) *the natural rate of growth*, maksudnya laju pertumbuhan produksi dan pendapatan sebagaimana

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

yang ditentukan oleh kondisi dasar (*fundamental conditions*) yaitu menyangkut (a) bertambahnya angkatan kerja karena penduduk bertambah, dan (b) meningkatnya produktivitas kerja karena kemajuan teknologi. Berdasarkan uraian di atas, Harrod berpendapat bahwa pertumbuhna kontinyu dalam ekuilibrium hanya bisa dicapai jika dipenuhi kedua syarat, yaitu berlangsungnya laju pertumbuhan yang *warranted* maupun laju pertumbuhan yang natural. Akan tetapi, faktor-faktor yang menentukan *warranted growth* rate berlainan dan terlepas dari faktor-faktor yang menentukan *natural growth rate*. Kenyataan tersebut menjadi petimbangan dasar bagi Harrod untuk mengungkapkan simpulan pokok yang bersifat *instability theorem*, pada proses pertumbuhan terkandung di dalamnya secara inheren unsur ketidakstabilan yang sewaktu-waktu dapat menggangu keadaan ekuilibrium, sedangkan teori Domar dikembangkan terlepas sama sekali (*independent*) dari karya Harrod, walaupun Domar sampai pada simpulan yang sama berdasarkan model yang kerangka susunannya mirip pada model Harrod, pangkal tolak bagi pendekatannya berbeda. Gagasan Domar berpangkal tolak pada berlakunya asas *investment multiplier*. Laju pertumbuhan pada permintaan efektif langsung dihadapkan kepada pertumbuhan pada kapasitas produksi. Dalam modelnya diungkapkan bahwa pertumbuhan pada permintaan adalah sama dengan pertambahan investasi (1) dikalikan oleh multiplier(1/s). Pertumbuhan pada kapasitas produksi adalah sama dengan investasi (I) dibagi oleh *capital output ratio* (k). Jadi petumbuhan pada permintaan adalah sama dengan pertumbuhan pada kapasitas produksi : $\Delta I/I = s/k$ (Djojohadikusumo, 1995 : 37-41). Pada persamaan di atas, oleh Domar dianggap sabagai laju pertumbuhan yang kritis

(*critical rate of growth*) yang analog dengan *warranted of growth* dalam model Harrod.

Jika investasi melebihi laju pertumbuhannya, maka penyimpangan tersebut menyebabkan bahwa $\Delta I/I$ (yang sama dengan pertumbuhan permintaan) akan lebih meningkat secara proporsioanal dibandingkan dengan s/k (pertumbuhan pada kapasitas produksi) : $\Delta I/I > s/k$. Keadaan tersebut akan membawa investasi dalam jumlah yang semakin besar.

Teori Harrod-Domar mempunyai beberapa asumsi, yaitu:

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh *(full employment)* dan barang-barang modal yang terdapat dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari 2 sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri dianggap tidak ada.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecenderungan untuk menabung *(marginal propensity to save = MPS)* besarnya tetap, demikian ratio antara modal-output *(capital-output ratio = COR)* dan rasio pertambahan modal-output (incremental capital-output ratio = ICOR).

Model Harrod-Domar yang sederhana untuk pertumbuhan ekonomi dapat diformulasikan sebagai berikut : Tabungan (S) adalah suatu proporsi (s) dari Pendapatan Nasional (Y) sehingga bentuk persamaan adalah :

$$S = s\,Y \qquad (1)$$

Investasi (I) diidentifikasi sebagai perubahan stok kapital K, yang Dapat dinyatakan sebagai ΔK, maka :

$$I = \Delta K \qquad (2)$$

Karena stok modal K mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau *output* Y, sebagaimana dikemukakan dalam konsep *capital output ratio* (COR) atau K, maka :

$$\frac{K}{Y} = k \text{ atau } \frac{\Delta K}{\Delta Y} = k$$

$$\Delta K = k\,\Delta Y \qquad (2a)$$

Selanjutnya karena jumlah tabungan (S) harus sama dengan jumlah investasi di dalam kaseimbangan, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

$$S = I \qquad (3)$$

Dari persamaan 1 diketahui bahwa S +s Y dan dari persamaan 2 dan 2a didapatkan I = ΔK = k/ ΔY. Dengan demikian dapat dituliskan identitas tabungan sama dengan investasi, seperti digambarkan dalam persamaan 3 :

$$S = s\,Y = k\,\Delta Y = \Delta K = \Delta I \qquad (3a)$$

atau

$$s\,Y = k\,\Delta Y \qquad (3b)$$

Selanjutnya apabila kedua sisi persamaan 3b mula-mula dibagi dengan Y dan kemudian dengan Δk, dari sini diperoleh persamaan sebagia berikut :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} \qquad (4)$$

Perlu diperhatikan bahwa sebelah kiri dari persaman yakni ΔY/Y menggambarkan tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan dari pendapatan nasional. Persamaan

4 membuktikan bahwa pertambahan barang-barang modal akan digunakan sepenuhnya jika tingkat pertumbuhan ekonomi adalah sebesar s/k yang dinamakan tingkat pertumbuhan yang dijamin *(warranted rate of growth).* Dinamakan demikian karena merupakan tingkat pertumbuhan yang dijamin penggunaan sepenuhnya dari tambahan barang-barang modal. Apabila pertumbuhan yang sebenarnya lebih rendah daripada pertumbuhan yang dijamin maka perekonomiam tersebut mengalami depresi yaitu sebagian alat-alat modal yang menganggur disebabkan oleh kekurangan permintaan masyarakat atas barang-barang modal tersebut. Sebaliknya perekonomian akan mengalami inflasi yaitu adanya kelebihan permintaan masyarakat atas barang-barang yang dapat dihasilkan oleh alat- alat modal jika penanaman modal yang sebenarnya dilakukan lebih besar dari penanaman modal yang diperlukan untuk menjamin tercapainya kapasitas penuh dalam penggunaan alat-alat yang tersedia.

Model Harrod-Domar mempunyai keterbatasan sebagai berikut (Arsyad, 1999: 69) :

1. Kecenderungan menabung dan rasio modal *output* adalah tidak konstan.
2. Buruh dan modal tidak dapat dipergunakan dalam produksi tetap.
3. Harga tidak konstan.
4. Tingkat suku bunga akan selalu mengalami perubahan.

Walaupun model Harrod-Domar mempunyai keterbatasan seperti yang tersebut di atas, model Harrod-Domar adalah penting karena merupakan suatu

upaya untuk mendinamiskan teori tabungan dan investasi jangka pandek statis yang diperkenalkan oleh Keynes.

2.1.3 Intervensi dan Fungsi Pemerintah

Menurut para ekonom, *private market* biasanya mengalokasikan sumber daya dengan cara yang paling efisien melalui mekanisme pasar, jika sistem pasar benar-benar efisien didalam mengalokasikan sumber daya, maka peranan pemerintah hanya terbatas, salah satunya ketika terjadi kegagalan dalam *private market* (Samuelson & Nordhaus,1994:49). Ketika konsumen atau produsen tidak menanggung biaya atau menghasilkan keuntungan secara penuh dari transaksi yang mereka lakukan maka dikatakan telah terjadi kegagalan pasar. Tiga sumber dari kegagalan pasar yang paling utama menurut Boyes (1992:429) adalah masalah eksternalitas, *lack of private to property rights*, dan adanya barang publik. Masalahnya adalah swasta dan individual-individual tidak mempunyai dorongan untuk mengoreksi masalah tersebut dan pada akhirnya pemerintah yang akan masuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegagalan pasar memberikan satu pembenaran atas tindakan pemerintah untuk melakukan intervensi dalam perekonomian.

Secara teori, pemerintah terpanggil untuk mengkoreksi permasalahan yang timbul berkaitan dengan eksternalitas, barang publik, monopoli alamiah, ketidak sempurnaan informasi, ketidakmerataan pendapatan dan *the lack of well defined property rights.* Tetapi pemerintah melakukan intervensi bukan hanya untuk kepentingan umum.

Ada tiga yang mendasari pemerintah ketika melakukan intervensi dalam perekonomian, yaitu (Boyes,1992:438)

1. *Public Interest Theory*

   Manurut *public interest theory of government* (teori kepentingan publik dari pemerintah) aktivitas pemerintah adalah ditujukan untuk memaksimalkan kebutuhan masyarakat. Sudut pandang kepentingan publik inilah yang menjadi dasar bagi Keynesian untuk merumuskan suatu kebijakan.

2. *Capture Theory*

   Intervensi pemerintah terjadi karena adanya *special interest group* yang mendominasi pemerintah, bertolak belakang dengan *public interest theory*, menyatakan bahwa aktivitas pemerintah ditujukan untuk keuntungan dan memaksimalkan kesejahteraan dari *special interest group* tersebut.

3. *Public Choice Theory*

   The public choice of government adalah berdasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah tidak lebih merupakan kumpulan dari banyak orang atau individu yang bekerja untuk pemerintah, masing-masing individu mencoba untuk memaksimalkan kepentingannya. Dalam sudut pandang ini pemerintah adalah sebuah organisasi yang kompleks terdiri dari banyak indvidu, masing-masing dengan tujuan yang berbeda.

2.1.4 Kebijakan Fiskal

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekenomian baik itu pada negara maju maupun Negara yang sedang berkembang. Seperti yang kita ketahui, pemerintah harus melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial budaya maupun politik bangsanya. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut pemerintah dapat dapat ikut campur secara aktif maupun secara pasif. Pada dasarnya pengertian kebijakan fiskal adalah seperti yang diungkapkan oleh Basri dan Sabri (2003 : 49) yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan, seperti pajak) dan pengeluaran (belanja, seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) uang oleh pemerintah. Sementara itu Suparmoko menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja Negara, artiya pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan Negara atau belanja Negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional.

Pemerintah memiliki berbagai kegiatan seperti pemeliharaan pertahanan keamanan, keadilan, pekerjaan umum dan lain sebagainya. Untuk semua kegiatan tersebut pemerintah memerlukan dana, sehingga pemerintah juga harus mendapatkan penerimaan setiap tahunnya. Untuk mengendalikan dan mencatat masalah-masalah pengeluaran dan penerimaannya, pemerintah menggunakan suatu anggaran. Menurut Suparmoko yang dimaksud dengan anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu digunakan

kebijaksanaan fiskal sebagai instrumen utama untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal dalam pelaksanaanya pastilah mempunyai pengaruh berarti dalam suatu perekonomian. Menurut Abipraja (1993 :73) menyebutkan bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dihubungkan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah mempunyai 4 akibat penting terhadap tingkat pembangunan. Hal ini karena :

1. Mempengaruhi alokasi sumber-sumber. Berdasarkan persetujuan DPR (badan legislatif) pengeluaran pemerintah didistribusikan pada seluruh sektor pengeluaran. Apabila pengeluaran pemerintah berubah maka alokasi untuk tiap-tiap sektor juga dapat berubah.
2. Mengubah pembagian pendapatan. Tingkat-tingkat fiskal dapat mengubah pembagian pendapatan melalui perubahan intitusional. Pembagian pendapatan dapat lebih merata dengan melalui tingkat *progresivitas* yang lebih besar dalam struktur pajak dan melalui pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk golongan-golongan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong akumulasi kapital. Di Negara berkembang sistem pajak progresif adalah untuk menghimpun jumlah tabungan pemerintah yang merupakan syarat pokok untuk investasi di lapangan pembangunan. Masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintah yang tinggi (khususnya *autonomous investment*) dalam rangka meningkatkan produktivitas. Investasi pemerintah tersebut hanya dapat diciptakan dengan adanya

tabungan pemerintah. Oleh karena itu tabungan pemerintah perlu diciptakan oleh negara melalui kebijaksanaan fiskal.

4. Mencegah inflasi. Kebijakan pengeluaran pemerintah dapat merupakan alat yang ampuh untuk mencegah terjadinya inflasi. Dengan membuat kebjiksanan anggaran berimbang (*balanced budget*), dapat diharapkan bahwa pemerintah tidak menjadi sumber terjadinya sumber inflasi.

Jenis kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah tergantung dari keadaan perekonomian, apakah dalam keadaan inflasi, deflasi, atau keadaan normal. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap, dalam artian tetap memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di pihak yang lain.

Kebijakan fiskal dalam perkembangannya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu (Mankiw, 2000 : 213) :

1. Kebijakan fiskal kontraktif

   Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan fiskal yang ditujukan untuk memperlambat aktifitas perekonomian. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menaikkan pajak (penerimaan pemerintah), pajak yang sifatnya mengurangi pendapatan seperti pajak penghasilan, pajak perusahaan dan suku bunga dan lain-lain atau mengurangi pengeluaran pemerintah (yang punya pengaruh langsung pada sektor riil,seperti proyek pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

transportasi dan lain-lain). Biasanya kebijakan ini dilakukan jika perekonomian dalam keadaan panas (*over heating*).

2. Kebijakan fiskal ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan fiskal yang ditujukan untuk mendorong aktifitas perekonomian. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menurunkan pajak (penerimaan pemerintah) atau menaikkan pengeluaran pemerintah. Biasanya kebijakan ini dilakukan jika perekonomian dalam keadaan lesu.

2.1.5 ABPN dan APBD

Realisasi dari kebijakan fiskal tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung. APBN dalam UU NO. 32/2004 diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah yang didetujui oleh DPR. Fungsi anggaran negara adalah :

a. Sebagai pedoman bagi pemerintahan dalam mengelola negara untuk suatu periode dimasa mendatang.
b. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPR terlebih dahulu.
c. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya, karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaanya oleh pemerintah kepada DPR.

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan Daerah (perda), dimana merupakan analog dengan kedudukan APBN dalam keuangan Negara. Keuangan Daerah selain dikelola secara langsung, disisi lain terdapat pula kekayaan daerah yang dipisahkan. Unsur – unsur APBD sebagai berikut : menurut : (Rahmi, 2005 :38)

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya – biaya sehubungan dengan aktivitas – aktivitas tersebut, dan adanya biaya – biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran -pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Seperti dengan anggaran pada umumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selalu mempunyai dua sisi yaitu sisi penerimaan atau pendapatan dan sisi pengeluaran. Selanjutnya penerimaan atau pendapatan dikelompokkan menjadi penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan; dan sisi pengeluaran juga dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Suparmoko, 2002 : 29)

2.1.6 Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah

2.1.6.1 Penerimaan Pemerintah

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang terpenting. Pajak dibagi dalam beberapa kategori, yaitu pajak pendapatan, pajak pengeluaran termasuk pajak penjualan, pajak penjualan dan tarif impor, dan pajak properti termasuk berbagai macam pajak rumah dan bangunan, pertanian dan tanah permukiman dan pajak warisan (Sachs dan Larrain, 1993: 189). Pajak juga diklasifikasikan sebagai pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung ditinjau dari tata usaha negara adalah:

- Pajak yang dikenakan atas dasar surat ketetapan pajak (kohir).
- Pajak yang dipungut secara berkala.

Sedangkan ditinjau dari segi ekonominya, pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser / dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak penghasilan.

2. Pajak tidak langsung ditinjau dari tata usaha negara adalah:

- Pajak yang pungutannya tidak dilakukan berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir).
- Pengenaannya tidak dilakukan secara berkala.

Ditinjau dari segi ekonominya, pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Sedangkan sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut UU No. 33 / 2004 terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan.

I. Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang – undangan. PAD itu sendiri bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 34 / 2000 dan PP No. 06 / 2001 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dari atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

c. Keuntungan Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruh kekayaan daerah maupun yang modalnya untuk sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain – lain PAD yang sah

Lain – lain PAD yang sah meliputi :

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b. Jasa giro
c. Pendapatan bunga
d. Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing
e. Komisi, potongan, ataupun bentuk – bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 6. dana perimbangan tersebut terdiri dari :

A. Dana Bagi Hasil

Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak, UU No. 32 / 2004 menyediakan dana bagi hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

B. Dana Alokasi Umum

DAU merupakan alokasi atau transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam bentuk

block grant sebagai pengganti dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang selama ini dilaksanakan dan penggunaannya diserahkan kepada pemerintah otonom dan besar dari dana yang dialokasikan tersebut pada potensi ekonomi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang – kurangnya 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN, didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip – prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya.

Dengan kata lain tujuan penting alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyedian pelayanan publik antara pemerintah daerah di Indonesia. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten / kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten / kota.

C. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada masing – masing pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain atau dengan kata lain Dana Alokasi Khusus bisa dianggap sebagai

Spesific Grant dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam melaksanakan Dana Alokasi Khusus, suatu kegiatan / program yang akan dilaksanakan harus didampingi dengan dan pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBD.

Kegiatan DAK berdasarkan PP No. 104 / 2000 meliputi :

a. DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dana atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.
b. Dalam keadaan tertentu dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun.

II. Pembiayaan, terdiri atas :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
2. Penerimaan pinjaman daerah

2.1.6.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa Y=C+I+G+X-M. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat, sedangkan variabel-variabel diruas kanan

disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan itu pula dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian (Dumairy, 1997 : 157).

Pengeluaran pemerintah atau *government expenditure* adalah penggunaan barang-barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Pemerintah dalam melaksanakan tugas atau fungsinya, melakukan kegiatan-kegiatan yang konkrit berupa penggunaan barang-barang dan jasa atau sumber daya ekonomi (Boediono, 1982:50).

Pengeluaran pemerintah terbagi dalam dua kelompok, yaitu: pengeluaran rutin *(current expenditure)* dan pengeluaran pembangunan *(capital expenditure).* Pengeluaran rutin bertujuan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dengan tetap mengacu kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta mutu pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pembangunan atau investasi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran yang akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian selanjutnya.

Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dalam satu periode tertentu dan merupakan investasi dari pemerintah untuk mendorong kegiatan produksi nasional melalui pembangunan berbagai proyek sehingga produk domestik bruto meningkat sesuai yang

direncanakan (Departemen Keuangan RI, 1996: 25). Pengeluaran pembangunan anatara lain digunakan untuk membiayai :

1. Proyek-proyek fisik seperti pembengunan proyek-proyek *overhead* dan *public utilities.*
2. Proyek-proyek non fisik seperti *up-grading*, penataran pimpinan, dan proyek pembinan mental masyarakat.

Pengeluaran pembangunan akan menghasilkan output kembali, terutama proyek-proyek *overhead* dan *public utilities.* Sifat dari pengeluaran pembangunan ini makin lama makin membesar, tetapi untuk pembiayaan suatu proyek akan mempunyai batas tertentu, karena setelah suatu proyek selesai maka pembinaan akan berpindah ke proyek lainnya (Widyastuti, 2005 :15).

Selain klasifikasi diatas pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Pengeluaran yang *self liquiditing* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa atau barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.
2. Pengeluaran pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkatan penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan kesehatan masyarakat (*public health*)

3. Pengeluaran yang tidak *self liquiditing* maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek-obyek tourisme. Dalam hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional.
4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan perang meskipun pada saat yang sama ketika pengeluaran terjadi, penghasilan perorangan yang menerima akan naik.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa yang akan datang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar (Irawan dan Suparmoko, 2003 :45).

Menurut Hugh Dalton dalam bukunya **"Principle of Public Finance"** kalau kita melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, tampak bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di dalam semua macam sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini dapat kita lihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Tetapi harus kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Nasional Bruto (GDP) adalah suatu ukuran kasar terhadap

kegiatan atau peranan pemerintah dalam suatu perekonomian (Irawan dan Suparmoko, 2003 : 21).

Peacock dan Weisman membedakan adanya 3 dampak pengeluaran pemerintah yaitu dampak penggantian (*displacement effect*), dampak inspeksi (*inspection effect*),dan dampak konsentrasi (*concentration effect*) (Irawan dan Suparmoko, 2003 : 23).

W.W. Rostow dan R.A. Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerntah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total, dengan perkataan lain juga rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional, relative besar. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi pihak swasta juga meningkat. Sementara itu Rostow juga berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan (Dumairy, 1997 : 163).

Berdasarkan penjelasan mengenai pengeluaran pemerintah tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G) mempengaruhi tingkat output. Apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka jumlah output dalam suatu negara akan meningkat pula sebesar peningkatan pengeluran pemerintah dikalikan dengan multiplier pengeluaran pemerintah. (Samuelson & Nordhous,1999) menyimpulkan bahwa :

> *Government purchase of goods and services (G) are in important force in the determinant of output and employment. In the multiplier model, if G*

increases, output will rise by the increases in G times the expenditure multiplier. Government spending therefore has the potential or destabilize over the businees cycles.

2.1.7 Konsep Pemikiran Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal

Ada pemikiran bahwa peranan atau fungsi dari pemerintah (terutama di bidang fiskal) adalah untuk menciptakan stabilisasi ekonomi, pemerataan pendapatan, dan mengalokasikan sumber daya alam. Khusus untuk fungsi stabilisasi dan pemerataan, akan lebih efektif apabila dilakukan pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi akan lebih efektif dilakukan pemerintah daerah (Kuncoro, 1995).

Pertimbangan utama (secara ekonomis) mengapa fungsi alokasi lebih baik dilaksanakan oleh daerah adalah efisiensi yang diperoleh dari kedekatan pemerintah sebagai penyedia jasa bagi masyarakat. Argumen ini merupakan salah satu titik tolak pemikiran dalam mendukung kebijakan desentralisasi fiskal. Pertimbangan lain yang mendukung desentralisasi fiskal adalah dalam rangka meningkatkan mobilisasi penerimaan sektor pemerintah secara keseluruhan, karena desentralisasi fiskal akan dapat memperluas jaringan pajak (*tax nett*) sehubungan dengan keakuratan informasi basis pajak yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Di samping itu, hal ini juga akan mendorong terjadinya distribusi penduduk dan ukuran daerah yang lebih baik, karena dimungkinkannya daerah memungut pajaknya sendiri.

Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal, yang meliputi aspek penerimaan dan pengeluaran. Dalam hal ini, desentralisasi fiskal

dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintahan daerah sebagai penyedia barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat (*public goods*). Penyerahan kewenangan di bidang fiskal pada dasarnya merupakan salah satu inti daripada desentralisasi. Demikian pula agar pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi yang didesentralisasikan secara efektif, pemerintah daerah harus memiliki sumber peneriman yang memadai, baik penerimaan yang digali dari daerahnya sendiri maupun yang ditransfer dari pusat, dan pemerintah daerah juga harus memiliki kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang pengeluaran.

Pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai bentuk atau wewenang, antara lain dari aspek : (Firdiana, 2004:31)

1. Pembiayaan sendiri (*self financing*) atau pemulihan biaya (*cost recovery*) melalui pungutan terhadap konsumen (*consumer charge*).
2. Pembiayaan dan produksi bersama, dimana pengguna jasa pelayanan pemerintah turut berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan dan infrastruktur melalui kontribusi tenaga kerja .
3. Perluasan basis penerimaan daerah, antara lain melalui pajak properti (PBB), pajak penjualan, atau pajak tidak langsung .
4. Transfer penerimaan umum atau pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk alokasi umum atau khusus.
5. Otorisasi melakukan pinjaman dan mobilisasi sumber sumber daya nasional dan lokal.

Cakupan desentralisasi fiskal dapat diukur dari besarnya kewenangan yang dimiliki dalam hal pengambilan keputusan, menyusun rencana dan menjalankan

anggaran belanja, dan fleksibilitas dalam mengkombinasikan penggunaan berbagai metoda pembiayaan yang sangat ditentukan oleh besarnya kewenangan dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan. Keleluasaan dalam bidang penerimaan dari ada atau tidaknya pajak daerah yang signifikan, kebebasan pemerintah daerah dalam menetapkan besarnya pungutan (*tarif*) dan cara perhitungan pajak, serta dalam hal pemberian sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam rangka penyediaan barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah seringkali terjadi sebagian besar sumber pembiayannya berasal dari transfer pemerintah pusat yang diperoleh dari pajak nasional dan penerimaan bukan pajak. Dalam kaitan ini, desentralisasi fiskal juga mencakup pendelegasian kewenangan dalam menetapkan besaran, dan arah pengeluran pemerintah daerah, serta kebebasan dalam menentukan prioritas pengalokasian dana yang berasal dari transfer pemerintahan pusat tersebut.

Dalam memformulasikan desentralisasi fiskal atau pola hubungan keuangan pusat dan daerah terdapat tiga pendekatan umum (*general approach*) yang dapat digunakan sebagai dasar dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu : (Firdiana, 2004:29)

1. Pendekatan penerimaan (*income approach*).
2. Pendekatan pengeluaran(*expenditure approach*).
3. Pendekatan yang menyeluruh (*comprehensive approach*).

Namun demikian, ada juga argumen yang tidak sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiskal karena berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat

menyebabkan fungsi stabilisasi menjadi lebih kompleks dan sulit dilakukan, sebagai akibat tidak terkontrolnya pengeluaran dan utang pemerintah daerah. Alasan lain yang juga tidak mendukung kebijakan desentralisasi fiskal adalah berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan antarpenduduk dan antarwilayah. Hal ini didasarkan pada perbedaan potensi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah (ada ketimpangan), sehingga desentralisasi fiskal akan cenderung memperburuk ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dengan sistem fiskal yang sentralistik, pemerataan antarwilayah/antardaerah dapat dilakukan, dengan cara mentransfer sumber daya dari daerah kaya kedaerah miskin.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Sebagaimana sudah dikemukakan, implikasi kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi masih banyak diperdebatkan dan eksplorasi empiris juga terus berkembang. Bagian sebelumnya memuat secara singkat temuan-temuan dari beberapa studi terdahulu, terutama yang berkait langsung dengan implikasi dari penerimaan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara ini, studi-studi terdahulu yang dapat dikemukakan di sini antara lain adalah oleh Rappaport (1999a), Aschauer (2000), Gupta *et al.* (2002) dan Brata (2004).

Studi Rappaport (1999) mengkaji empat kelompok fakta-fakta empiris dari pertumbuhan ekonomi antar daerah lokal di Amerika Serikat dengan menggunakan data panel atribut lokal Amerika Serikat tahun 1970-1990. Salah satu kelompok fakta empiris yang dikaji adalah korelasi-korelasi kebijakan anggaran pemerintah dari pertumbuhan ekonomi lokal. Hubungan antara

kebijakan anggaran pemerintah lokal dengan pertumbuhan ekonomi lokal tersebut (dilihat dari tiga indikator: migrasi netto, pertumbuhan pendapatan per kapita, dan pertumbuhan harga perumahan), dari estimasi-estimasinya Rappaport mendapatkan empat fakta proses pertumbuhan.

Keempat fakta proses pertumbuhan ekonomi lokal Amerika Serikat tersebut adalah: *pertama* adalah bahwa dari tahun 1970 sampai 1990, pertumbuhan ekonomi lokal berkorelasi negatif dengan besaran keuangan pemerintah lokal; *kedua*, pertumbuhan ekonomi lokal sepanjang periode yang diamati berkorelasi positif dengan pengeluaran pemerintah lokal untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah; *ketiga*, pertumbuhan ekonomi daerah tahun 1970 sampai 1990 berkorelasi negatif dengan pajak pendapat personal lokal; *keempat*, pertumbuhan ekonomi daerah berkorelasi negatif dengan pajak penjualan tertentu yang diambil oleh pemerintah lokal. Tampak yang diamati di sini bukan hanya komposisi investasi pemerintah tetapi juga komposisi penerimaan pemerintah lokal.

Berbeda dengan Rappaport, studi Aschauer (2000), menggunakan data 46 negara pendapatan rendah dan menengah dengan periode waktu 1970-1990. Selain menganalisis aspek penerimaan, studi tersebut sekaligus juga menganalisis aspek besaran investasi pemerintah serta efisiensinya. Berkaitan dengan aspek penerimaan, Aschauer menggunakan utang luar negeri sebagai proksi dari total utang pemerintah. Beban pajak sehubungan dengan pengakumulasian modal publik dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif tersebut misalnya melalui pajak yang secara berlebihan

dibebankan kepada sektor swasta sehingga pada akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Aschauer dalam estmasinya menemukan bahwa peningkatan investasi pemerintah yang dibiayai dengan utang luar negeri membawa pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pembiayaan dengan utang luar negeri telah mengurangi manfaat positif dari investasi sektor publik.

Adapun Gupta *et al.* (2002) melakukan studinya dengan kasus 39 negara ESAF dan PRGF dengan kurun waktu 1990-2000. Studi tersebut lebih dimaksudkan untuk mengetahui apakah *fiscal adjustment* dan perbaikan komposisi pengeluaran pemerintah memiliki manfaat baik bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Sumber pembiayaan pemerintah juga diamati di sini dengan dilatarbelakangi kenyataan bahwa selama ini studi-studi yang ada belum memperhatikan apakah defisit yang dibiayai dari luar negeri memiliki perbedaan dampak terhadap pertumbuhan dibandingkan defisit yang dibiayai dengan sumber-sumber dana dalam negeri.

Selain menemukan bahwa komposisi pengeluaran pemerintah yang lebih produktif penting artinya bagi pertumbuhan dan pencapaian *fiscal adjustment* yang berkelanjutan, *Gupta et al.* (2002) juga menyebutkan bahwa komposisi pembiayaan defisit juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Namun, berbeda dengan temuan Aschauer di atas, *Gupta et al.* justru menemukan bahwa pembiayaan defisit anggaran pemerintah dari sumber-sumber domestik lebih merugikan pertumbuhan ekonomi daripada pinjaman luar negeri.

Gambaran antara negara-negara yang belum mengalami stabilitasi ekonomi dan yang telah mencapai stabilitasi diperoleh *Gupta et al.* (2002) dengan melakukan estimasi secara terpisah terhadap masing-masing kelompok tersebut. Bagi negara-negara dalam hal ini dengan defisit anggaran yang rendah, tambahan konsolidasi anggaran tidaklah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun yang lebih penting adalah bahwa dampak buruk pembiayaan defisit di negara-negara tersebut tidaklah separah di negara-negara yang belum mencapai stabilisasi. Penelitian lain dilakukan pula oleh Rahayu (2000) dengan judul penelitiannya "Peranan Sektor Publik Lokal dan Sektor Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Kesenjangan yang terjadi di Indonesia (1987-1996)". Berdasarkan hasil estimasi dan proses perhitungan yang dilakukan, diperoleh bahwa secara garis besar hasil estimasi persamaan menunjukkan bahwa ternyata selama periode pengamatan peranan sektor publik lokal (penerimaan, investasi, tenaga kerja, dan pajak daerah) dan sektor swasta mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik untuk hasil analisis estimasi dengan memasukkan hasil migas maupun non migas. Pajak lokal dan penerimaan non pajak mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara investasi dan konsumsi pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang positif. Model analisis yang digunakan GLS (*General Least Square*) yang menyediakan hubungan antara sektor publik lokal dan sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Sampel penelitian menggunakan data panel dari 26 provinsi di Indonesia dengan periode penelitian 1987-1996.

Studi selanjutnya dilakukan oleh Brata (2004), dengan mengunakan data fiskal dari 26 propinsi di Indonesia dengan estimasi yang lebih ditujukan untuk mencari tahu pengaruh variabel penerimaan sektor publik. Adapun data tersebut terdiri dari lima bagian yaitu: Bagian Sisa Anggaran Tahun Lalu (kode : 101), Bagian Pendapatan Asli Daerah (kode : 102), Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (kode: 103), Bagian Sumbangan dan Bantuan (kode : 104), dan Bagian Penerimaan Pembangunan (kode : 105). Temuan penelitian ini adalah terdapat dua komponen penerimaan pemerintah daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD (102) dan Bagian Sumbangan dan Bantuan (104). Sedangkan komponen penerimaan (103) yakni bagi hasil pajak dan bukan pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Hal serupa juga terjadi pada komponen 101 (Bagian Sisa Anggaran Tahun Lalu) dan 105 (Bagian Penerimaan Pembangunan), yang juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian. Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan sebelumnya adalah priode penelitian, variabel, dan metode statistik penelitian.

2.3. Hipotesis dan Model Analisis

2.3.1 Hipotesis

1. Diduga sisi pengeluaran APBD (Pengeluran Rutin, Pengeluaran Pembangunan) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

2. Diduga sisi penerimaan APBD (Dana Perimbangan, PAD) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.
3. Diduga terdapat perbedaan kontribusi sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dalam APBD terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia pada periode sebelum dan sesudah penerapan Otonomi Daerah.

2.3.2 Model Analisis

Model persamaan yang akan diestimasi dengan teknik ini ialah model yang dimodifikasi dari penelitian Brata (2004). Adapun model tersebut sebagai berikut :

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PR_{it} + \beta_3 PP_{it} + \beta_4 DA + \beta_5 D_{OTODA} + e_{it}$$

di mana :

$PDRB_{it}$ = PDRB riil daerah *i* pada periode *t;*

PR_{it} = Pengeluaran rutin daerah *i* pada periode *t;*

PP_{it} = Pengeluaran pembangunan daerah *i* pada periode *t;*

PAD_{it} = Pendapatan asli daerah *i* pada periode *t;*

DA_{it} = Dana perimbangan untuk daerah *i* pada periode *t;*

D_{OTODA} = Variabel dummy untuk periode penerapan kebijakan otonomi daerah;

$\beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5$ = Koefisien regresi;

e_{it} = Koefisien pengganggu.

BAB 3

METODE PENELITAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode regresi data panel, sedangkan pendekatan kualitatif akan digunakan untuk membahas intrepretasi lebih lanjut dari hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dalam analisis kuantitatif.

3.2. Identifikasi Variabel

Pada penelitian ini, terdapat lima variabel yang dapat dikelompokkan menjadi dua variabel. Adapun variabel-variabel tersebut yaitu: variabel tak bebas (*dependent variable*) adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto Riil (PDRB). Variabel bebas (*independent variable*) adalah Pengeluaran Rutin Daerah (PR), Belanja Pembangunan Daerah (PP), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DA), dan Dummy Otonomi Daerah (D_{OTODA})

3.3. Definisi Operasional

Adapun definisi dari variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengeluaran Rutin Daerah (PR) : adalah pengeluaran rutin masing masing daerah penelitian dan merupakan ukuran kebijakan fiskal didaerah dari sisi pembiayaan rutin. Data pengeluaran rutin daerah diukur dalam juta rupiah

dan merupakan pengeluaran nominal yang tidak termasuk urusan kas dan perhitungan (UKP). Dalam laporan Departemen Keuangan menggunakan kode 3. Data pengeluaran rutin daerah yang digunakan adalah data pada tahun kalender. Adapun data PR yang menggunakan tahun fiskal akan ditransformasikan dalam tahun kalender dengan cara membagi 12 Pengeluaran rutin untuk tahun fiskal t-1/t untuk mendapatkan PR perbulan dan bulan april t-1 sampai bulan maret t (12 bulan). Nilai PR tahun kalender t didapatkan dengan menjumlah PR perbulan Januari t sampai Desember t (12 bulan). Transformasi yang sama juga dilakukan pada variabel APBD yang ada dalam penelitian ini.

b. Belanja Pembangunan Daerah (PP) : adalah pengeluaran pembangunan masing-masing daerah penelitian dan merupakan ukuran kebijakan fiskal di daerah dari sisi pembiayaan pembangunan. Data pengeluaran pembangunan daerah diukur dalam juta rupiah dan merupakan pengeluaran nominal yang tidak termasuk urusan kas dan perhitungan (UKP). Dalam laporan Departemen Keuangan menggunakan kode 4.

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : adalah penerimaan daerah dari sumber-sumber lokal termasuk retribusi dan pajak, yang merupakan salah satu ukuran potensi fiskal suatu daerah. Data pendapatan asli daerah diukur dalam juta rupiah dan merupakan penerimaan nominal yang tidak termasuk urusan kas dan perhitungan (UKP). Dalam laporan Departemen Keuangan menggunakan kode 102.

d. Dana Perimbangan (DA) : adalah dana yang diberikan kepada masing-masing daerah oleh pemerintah pusat yang tidak termasuk urusan kas dan perhitungan (UKP). Dalam laporan Departemen Keuangan menggunakan kode 103. Dalam laporan Departemen Keuangan, untuk tahun 1998 – 1999 disebut sebagai bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak, sedangkan sejak tahun 2000 dan seterusnya disebut sebagai bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi, yang termasuk juga dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

e. Pendapatan Domestik Regional Bruto Riil (PDRB) : adalah pendapatan domestik regional bruto menurut lapangan usaha di tiap-tiap daerah penelitian, atas dasar harga konstan 2000 dalam jutaan rupiah.

f. Dummy Otonomi Daerah (DOTODA) : adalah variabel boneka (tambahan), untuk membedakan periode sebelum dan sesudah penerapan kebijakan otonomi daerah

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan data panel (gabungan antara data *time-series* dan *cross section*) dalam bentuk tahunan. Data *time series* yang digunakan dimulai dari periode 1994 sampai 2004 (10 tahun), sedangkan data *cross section* yang digunakan adalah data yang terdiri dari 26 provinsi di Indonesia.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara *online* Laporan Realisasi APBD Provinsi-provinsi di Indonesia yang disediakan dalam situs Departemen Keuangan dan secara manual dari Indikator Ekonomi, Propinsi

dalam Angka dan Produk Domestik regional Bruto menurut Provinsi di Indonesia (terbitan Badan Pusat Statistik), dan juga data yang berasal dari sumber-sumber lain yang relevan dipergunakan dalam penelitian ini.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilaksanakan dalam dua cara, yaitu: melalui internet dari Depkeu online, dan BPS online, dan juga secara manual dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan yang di antaranya berasal dari Indikator Ekonomi, Provinsi dalam Angka dan Produk Domestik regional Bruto menurut Propinsi di Indonesia (BPS)

3.6. Teknik Analisis Regresi Data Panel

Langkah utama dalam peelitian ini adalah melakukan estimasi model penelitian dengan melalui pendekatan data panel. Pada dasarnya ada tiga teknik untuk meregresi data panel yakni (Pindyck dan Rubinfeld, 1998 : 112): pendekatan OLS Biasa (PLS), pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Mode/FEM*), pendekatan efek acak (*Random effect Model/REM*).

Pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa keunggulan (Gujarati, 2003 :351). **Pertama,** panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengijinkan variabel spesifik individu. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini, pada gilirannya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks. **Kedua**, jika efek spesifik signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya, penggunaan panel data akan mengurangi

kemudahan perhitungan, yaitu FEM.

section tidak acak maka FEM lebih tepat, sebaliknya jika *cross-section* acak maka REM lebih tepat.

3. Jika komponen *error* individu berkorelasi maka penaksir REM adalah bias dan penaksir FEM tidak Bias.
4. Jika N besar dan T kecil serta asumsi REM dipenuhi maka penaksir REM lebih efisien dari penaksir FEM.

Untuk melakukan deteksi awal pengaruh otoda terhadap PDRB di indonesia, deteksi dilakukan dengan melihat koefisien dari *dummy* variabel otoda. Dengan model awal sebagai berikut :

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PR_{it} + \beta_3 PP_{it} + \beta_4 DA + \beta_5 D_{OTODA} + e_{it}$$

Jika ternyata variabel itu signifikan maka analisis pengaruh otoda terhadap PDRB dapat diperluas dengan menambah variabel *dummy* multilpikatif pada model sebagai berikut :

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PR_{it} + \beta_3 PP_{it} + \beta_4 DA_{it} + \beta_5 (D_{otoda} * PAD_{it}) + \beta_6 (D_{otoda} * PR_{it}) + \beta_7 (D_{otoda} * PP_{it}) + \beta_8 (D_{otoda} * DA_{it}) + e_{it}$$

Ket : $\beta_5, \beta_6 \beta_7, \beta_8$ adalah koefisien variabel *dummy* multiplikatif yang digunakan untuk melihat dampak otoda terhadap perubahan hubungan dari variabel-variabel sebelumnya.

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran dari masing-masing parameter dalam model di atas. Nilai dari parameter ini kemudian akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam konteks

penelitian ini yang ingin diketahui ialah kebijakan fiskal yang bagaimanakah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

3.6.1 Uji Statistik

Setelah model panel data tersebut diestimasi, maka langkah-langkah selanjutnya ialah melakukan pengujian statistik terhadap hasil estimasi model panel tersebut. Uji statistik terdiri dari uji R^2, uji signifikasi parameter secara parsial (uji t), dan uji signifikasi parameter secara simultan (uji F).

a. Koefisien Determinasi Majemuk R^2

Kegunaan dari uji R^2 ini adalah untuk menentukan apakah variabel independennya dapat menerangkan variabel dependennya dengan baik. Nilai R^2 berkisar antara 0-1. Suatu model *time series* apabila R^2 mencapai angka 1 maka variabel independennya dapat menerangkan variabel dependen dengan sempurna. Sebaliknya apabila R^2 mencapai angka 0 berarti variabel independennya tidak dapat atau lemah dalam menerangkan variabel dependen.

b. Uji t

Fungsi uji t adalah untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan suatu variabel bebas secara individual dalam mempengaruhi variabel tidak bebas. Dalam hal ini ditetapkan hipotesis sebagai berikut :

$H_o : b_i = 0$

$H_a ; b_i \neq 0$

Apabila t_o ($t_{observasi}$) < t_t (t_{tabel}), maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak atau model yang digunakan kurang baik, artinya variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikatnya atau tidak signifikan. Sebaliknya jika t_o ($t_{observasi}$) > t_t (t_{tabel}), maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya atau signifikan.

c. Uji F

Kegunaan uji F untuk menentukan signifikan atau tidak signifikannya suatu variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel tidak bebas. Dalam hal ini ditetapkan sebagai berikut :

$H_o : b_1 = b_2 = b_3 = \ldots\ldots = b_k = 0$

$H_a ; b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq \ldots\ldots = b_k \neq 0$

Jika hasil perhitungan ternyata, F_o ($F_{observasi}$) < F_t (F_{tabel}), maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Bila terjadi keadaan demikian, maka dapat dikatakan bahwa variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variabel bebasnya. Sebaliknya, jika F_o ($F_{observasi}$) > F_t (F_{tabel}) maka dapat dikatakan hipotesis nol (H_o) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Bila terjadi keadaan demikian, maka dapat dikatakan bahwa variasi dari model regresi dapat menerangkan variasi variabel bebasnya.

Alat bantu analisis kuantitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah program komputer *Economic Views* versi 4.1 (*Eviews 4.1.*).

3.6.2 Uji asumsi klasik

Pada skripsi ini tidak akan dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap hasil estimasi model penelitian data panel sebagaimana umunya dilakukan pada hasil estimasi model dengan teknik OLS terhadap data *time series* ataupun *cross section*.

Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu :

1. Literatur ekonometri yang digunakan dalam skripsi ini tidak menjelaskan mengenai metode untuk menguji asumsi klasik pada model regresi data panel (Grifiths, 2001; Maddala, 1998; Pyndick & Rubbinfield, 1991; dan Gujarati, 2003).
2. Pada fasilitas yang disediakan oleh eviews 4.1 untuk mengolah data panel tidak tersedia menu untuk menguji asumsi klasik (*residual test*).
3. Meskipun tidak menyediakan menu untuk menguji asumsi-asumsi klasik (*residual test*) pada data panel. Eviews 4.1 menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengakomodasi masalah pelanggaran asumsi klasik tersebut seperti heterokedastisitas dan autokorelasi. Eviews 4.1 menyediakan fasilitas interasi otomatis dalam spesifikasi AR (*Auto Regresif*) hingga bobot dan koefisien parameternya konvergen (*Eviews 4.1 user's guide*) untuk permasalahan autokorelasi.

BAB 4

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian

4.1.1 Rasio PAD Terhadap PDRB di Daerah Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas daerah dan lain-lain usaha yang sah, semuanya itu merupakan sumber penerimaan murni daerah. PAD adalah salah satu indikator kemandirian pemerintah daerah dalam menyediakan dana, baik dana pembangunan ataupun dana untuk pengeluaran rutin.

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa daerah yang menjadi obyek penelitian ini meliputi 26 Provinsi di Indonesia. Dari 26 Provinsi tersebut memiliki perkembangan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup bervariasi baik dalam masa sebelum diterapkannya otonomi daerah maupun setelah pelaksanaan otonomi daerah.

Peningkatan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto dapat digunakan sebagai salah satu indikator dari kemampuan atau kemandirian daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah apabila rasio PAD terhadap PDRB daerah setempat semakin meningkat maka dapat disimpulkan bahwa daerah yang bersangkutan semakin maju dan mandiri, serta mengurangi persentase ketergantungan dari daerah yang bersangkutan terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya apabila rasio PAD terhadap

PDRB semakin mengecil berarti kemampuan untuk mengoptimalkan potensi daerah yang bersangkutan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat semakin menurun dan hal ini akan menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin meningkat.

Guna melihat bagaimanakah rasio PAD terhadap PDRB, yang mengindikasikan kemandirian suatu daerah di Indonesia berikut ini akan ditampilkan data kontribusi PAD terhadap PDRB daerah yang bersangkutan dari 26 provinsi di Indonesia seperti tampak pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 menunjukkan sebelum pelaksanaan otonomi daerah kemampuan dari daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah antara propinsi yang ada di Pulau Jawa dan Luar Jawa hampir tidak berbeda atau penyebarannya relatif merata dengan nilai rata-rata rasio PAD terhadap PDRB sekitar 0,68%. Pada saat era sesudah diberlakukannya Otoda nilai rata-rata rasio PAD terhadap PDRB meningkat menjadi 4,03 %.

Di pulau Jawa dapat dilihat ada 5 provinsi di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogya, Jawa Tengah), di mana kontribusi PAD terhadap PDRB daerah yang bersangkutan sebelum otoda menunjukkan rasio yang cukup tinggi . Setelah pelaksanaan otonomi daerah yaitu tepatnya pada tahun 2004 kontribusi PAD dari provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogya, Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Kondisi semacam ini menunjukkan kemampuan optimalisasi potensi daerah oleh masyarakat dan pemerintah daerah dari provinsi yang bersangkutan semakin mengalami peningkatan.

Tabel 4.1

Rasio PAD Terhadap PDRB 26 Provinsi di Indonesia

RASIO PAD TERHADAP PDRB		
PROVINSI	Sebelum Otoda	Setelah Otoda
	PAD	PAD
Aceh	0.30	2.13
Sumut	0.62	4.08
Sumbar	0.69	4.09
Riau	0.42	2.79
Jambi	0.80	7.20
Sumsel	0.55	3.58
Bengkulu	0.74	5.22
Lampung	0.63	0.06
DKI Jakarta	2.37	9.39
Jabar	0.60	4.42
Jateng	0.58	4.16
DI Yogya	0.88	6.41
Jatim	0.64	4.10
Kalbar	0.46	2.82
Kalteng	0.34	0.12
Kalsel	0.58	4.95
Kaltim	0.34	2.71
Sulut	0.84	3.91
Sulteng	0.71	4.26
Sulsel	0.73	4.81
Sultra	0.67	3.85
Bali	1.03	6.75
NTB	0.55	3.04
NTT	0.77	3.53
Maluku	0.69	4.30
Irja	0.27	1.73

PENDAPATAN ASLI DAERAH 26 PROVINSI DI INDONESIA		
PROVINSI	Sebelum Otoda	Setelah Otoda
	PAD	PAD
Aceh	32643.44	198432.40
Sumut	124141.38	1143128.73
Sumbar	44926.33	375074.87
Riau	75972.68	710384.05
Jambi	21285.89	287637.72
Sumsel	54441.06	493173.95
Bengkulu	10948.95	103611.49
Lampung	36303.55	4954.46
DKI Jakarta	1316884.65	6430334.81
Jabar	349516.53	2846800.73
Jateng	211577.95	1865390.53
DI Yogya	39081.20	347410.07
Jatim	339829.32	2860561.59
Kalbar	25656.25	224234.02
Kalteng	11266.01	5636.23
Kalsel	28746.53	364181.39
Kaltim	59213.49	705451.21
Sulut	19720.45	147139.84
Sulteng	13348.74	122907.88
Sulsel	59389.96	563613.15
Sultra	9189.15	79956.86
Bali	63084.07	559689.36
NTB	14946.39	170222.97
NTT	17520.47	123690.37
Maluku	11323.39	57507.69
Irja	13767.73	162101.86

Sumber: Departemen Keuangan RI. *Nota Keuangan dan RAPBN.* www.depkeu.go.id. Data diolah.

Tabel 4.1 juga menunjukkan daerah atau provinsi dengan kontribusi PAD terbesar terhadap PDRB cenderung tidak berubah. Di antaranya : propinsi DKI Jakarta, Bali, dan Jambi. Pada ketiga provinsi tersebut baik dalam masa sebelum otonomi daerah maupun setelah otonomi daerah dilaksanakan kontribusi PAD

terhadap PDRB daerah yang bersangkutan selalu berada pada urutan lima peringkat teratas bila dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan kemandirian dari ketiga provinsi tersebut untuk mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing sudah berlangsung cukup lama dan selalu konsisten.

4.1.2 Rasio Dana Alokasi Terhadap PDRB di Daerah Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dana alokasi mencakup dua hal yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebenarnya berdasarkan pasal 10 UU No 33 tahun 2004 masuk dalam lingkup dua diantara tiga dana perimbangan. Besarnya dana perimbangan ini ditetapkan tiap tahun berdasarkan APBN.

Berdasarkan UU No 33 tahun 2004, DAU dialokasikan untuk setiap daerah atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal yang dimaksud adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal dari daerah yang bersangkutan. Daerah yang memiliki celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar, sedangkan yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dimana besarnya DAK ini ditetapkan setiap tahun dalam APBN berdasarkan masing-masing bidang kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam APBN.

Berikut ini adalah perkembangan dari rasio dana alokasi terhadap PDRB dari daerah yang bersangkutan, yang meliputi 26 propinsi yang ada di Indonesia

pada era sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangannya seperti tampak pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rasio Dana Alokasi Terhadap PDRB

RASIO DANA ALOKASI TERHADAP PDRB		
PROVINSI	Sebelum Otoda	Setelah Otoda
	DA	DA
Aceh	0.20	11.59
Sumut	0.14	6.50
Sumbar	0.13	0.70
Riau	0.30	22.90
Jambi	0.34	1.86
Sumsel	0.38	13.41
Bengkulu	0.17	11.59
Lampung	0.11	3.73
DKI Jakarta	0.40	7.42
Jabar	0.06	6.16
Jateng	0.06	8.36
DI Yogya	0.10	5.22
Jatim	0.06	1.76
Kalbar	0.27	1.33
Kalteng	1.16	1.83
Kalsel	0.46	4.80
Kaltim	0.42	4.13
Sulut	0.27	4.24
Sulteng	0.34	9.52
Sulsel	0.24	5.26
Sultra	0.44	4.89
Bali	0.08	2.86
NTB	0.13	6.64
NTT	0.19	2.23
Maluku	0.89	3.36
Irja	1.05	4.18

DANA ALOKASI 26 PROVINSI DI INDONESIA		
PROVINSI	Sebelum Otoda	Setelah Otoda
	DA	DA
Aceh	22295.18	1205286.14
Sumut	26928.69	512975.46
Sumbar	83338.37	308832.75
Riau	53904.28	1244806.23
Jambi	9122.59	333981.29
Sumsel	38288.21	55979.89
Bengkulu	2459.58	230118.00
Lampung	6185.28	187756.26
DKI Jakarta	219519.23	5115991.51
Jabar	36980.22	1197663.95
Jateng	20643.21	789076.69
DI Yogya	4272.55	283268.47
Jatim	32995.64	862509.97
Kalbar	15085.89	380825.80
Kalteng	38496.04	172592.54
Kalsel	22602.52	303792.98
Kaltim	73343.16	1727165.09
Sulut	6272.05	244934.09
Sulteng	6513.07	202135.37
Sulsel	19247.47	496743.22
Sultra	6076.59	278493.52
Bali	4968.39	236938.13
NTB	3544.88	294335.98
NTT	4305.47	333935.26
Maluku	14706.37	306403.98
Irja	53444.93	575324.05

Sumber: Departemen Keuangan RI. *Nota Keuangan dan RAPBN.* www.depkeu.go.id. Data diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 tersebut dapat dilihat hampir disemua propinsi yang ada di Indonesia rasio dana alokasi terhadap PDRB dari daerah yang bersangkutan setelah pelaksanaan otonomi daerah mengalami peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, dana dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah semakin meningkat.

4.1.3 Rasio Pengeluaran Pembangunan Terhadap PDRB di Daerah Penelitian

Seperti telah diketahui dua unsur pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah meliputi pengeluaran/belanja rutin dan pengeluaran/belanja pembangunan. Pengeluaran pembangunan adalah suatu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh pemerintah daerah untuk keperluan publik seperti pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

Pengeluaran pembangunan ini dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting. Karena pengeluaran pembangunan ini dapat diidentikkan dengan investasi pemerintah. Pada umumnya pengeluaran pembangunan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan raya untuk memperlancar arus barang dan jasa yang penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Terlebih dalam pelaksanaan otonomi daerah di mana daerah dituntut untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, maka pengeluaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menunjang hal tersebut mutlak diperlukan dan ditingkatkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengeluaran pembangunan dari masing-masing daerah di 26 provinsi di Indonesia sangat variatif. Tabel 4.3 akan menyajikan bagaimana rasio pengeluaran pembangunan dari masing-masing daerah terhadap PDRB dari daerah yang bersangkutan.

Tabel 4.3

Rasio Pengeluaran Pembangunan Terhadap PDRB 26 Provinsi di Indonesia

RASIO PENGELUARAN PEMBANGUNAN TERHADAP PDRB		
PROVINSI	Sebelum Otoda	Setelah Otoda
	PP	PP
Aceh	0.76	5.25
Sumut	1.47	1.54
Sumbar	0.61	1.38
Riau	1.41	2.9
Jambi	0.65	3.15
Sumsel	0.97	2.06
Bengkulu	0.46	3.35
Lampung	0.67	0.99
DKI Jakarta	7.75	4.56
Jabar	3.25	1.35
Jateng	1.89	1.32
DI Yogya	0.41	1.25
Jatim	3.19	2.31
Kalbar	0.78	1.66
Kalteng	0.91	1.64
Kalsel	0.72	1.94
Kaltim	1.18	3.12
Sulut	0.56	2.6
Sulteng	0.67	2.98
Sulsel	0.99	2.1
Sultra	0.57	4.92
Bali	0.7	2.33
NTB	0.6	2.71
NTT	0.73	3.21
Maluku	0.7	8.17
Irja	1.09	8.01

PENGELUARAN PEMBANGUNAN 26 PROVINSI		
PROVINSI	Sebelum Otoda	Setelah Otoda
	PP	PP
Aceh	54991.71	507143.30
Sumut	93518.18	506158.03
Sumbar	45235.64	223750.87
Riau	104963.32	1117696.84
Jambi	52634.22	241821.91
Sumsel	81287.13	594899.00
Bengkulu	37155.57	131794.95
Lampung	51077.90	67481.51
DKI Jakarta	788109.32	5480000.39
Jabar	239278.11	944230.17
Jateng	131636.05	722971.62
DI Yogya	36907.19	183897.58
Jatim	231986.19	1380503.06
Kalbar	66365.39	150725.23
Kalteng	83442.86	77897.31
Kalsel	53991.80	241861.22
Kaltim	97295.52	1187361.34
Sulut	487444.30	73438.37
Sulteng	58893.92	116156.84
Sulsel	84666.75	245277.18
Sultra	4200.66	11786.60
Bali	50518.22	157341.88
NTB	42927.44	129038.38
NTT	70849.79	116325.14
Maluku	64667.81	142916.09
Irja	89252.40	829554.61

Sumber: Departemen Keuangan RI. *Nota Keuangan dan RAPBN.* www.depkeu.go.id. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa setelah pelaksanaan otonomi daerah rasio pengeluaran pembangunan mengalami peningkatan hampir di semua daerah. Hal ini mengindikasikan pemerintah-pemerintah daerah giat melaksanakan pembangunan dalam rangka memenuhi kepentingan publik didaerah dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki.

Semakin besar rasio pengeluaran pembangunan ini, maka sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi akan semakin banyak, sehingga peluang untuk mengoptimalkan potensi dari daerah yang bersangkutan semakin besar. Oleh sebab itu semua aparatur pemerintah serta masyarakat di daerah harus menyadari kondisi semacam ini jika daerahnya tidak ingin menjadi daerah yang tertinggal.

4.1.4 Rasio Pengeluaran Rutin Terhadap PDRB di Daerah Penelitian

Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah untuk belanja rutinitas seperti biaya pegawai dan biaya administrasi laninya yang sifatnya rutin. Biasanya akan terjadi suatu *trade off* antara pengeluaran rutin dengan pengeluaran pembangunan. Artinya jika pemerintah daerah meningkatkan pengeluaran pembangunan maka pemerintah harus melakukan penghematan pada pos-pos yang menyangkut pengeluaran rutin. Sebaliknya jika pemerintah daerah tidak dapat menghemat dalam hal pengeluaran rutin maka konsekuensinya pengeluaran pembangunan akan semakin mengecil. Dan semakin mengecilnya proporsi dari pengeluaran pembangunan ini tentunya akan berdampak pada menurunnya kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana guna memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Berikut ini adalah data rasio pengeluaran rutin oleh pemerintah daerah terhadap PDRB dari daerah yang bersangkutan. Tabel 4.4 ini akan memaparkan data dari rasio pengeluaran rutin 26 pemerintah provinsi di Indonesia terhadap PDRB dari daerah masing-masing.

Tabel 4.4

Rasio Pengeluaran Rutin Terhadap PDRB 26 Provinsi di Indonesia

RASIO PENGELUARAN RUTIN TERHADAP PDRB		
Daerah	Sebelum Otoda	Setelah Otoda
	PR	PR
Aceh	1.32	4.14
Sumut	1.77	2.06
Sumbar	1.18	3.32
Riau	0.7	2.09
Jambi	1.42	5.32
Sumsel	1.12	2.47
Bengkulu	2.56	7.05
Lampung	1.32	1.29
DKI Jakarta	2.89	7.93
Jabar	1.52	2.48
Jateng	2.3	2.78
DI Yogya	2.81	5.59
Jatim	1.45	1.34
Kalbar	0.99	3.29
Kalteng	2.75	2.36
Kalsel	2.2	3.76
Kaltim	0.94	3.14
Sulut	2.41	6.14
Sulteng	4.86	6.88
Sulsel	1.21	3.28
Sultra	2.44	7.69
Bali	1.21	4.48
NTB	1.39	4.35
NTT	1.83	5.15
Maluku	2.82	8.62
Irja	2.5	7.83

PENGELUARAN RUTIN 26 PROVINSI DI INDONESIA		
PROVINSI	Sebelum Otoda	Setelah Otoda
	PR	PR
Aceh	146196.57	507143.30
Sumut	422108.68	995380.99
Sumbar	63249.05	429114.17
Riau	78905.03	857756.10
Jambi	29012.18	339610.94
Sumsel	86041.60	545888.40
Bengkulu	25526.56	208321.19
Lampung	61757.40	134105.68
DKI Jakarta	1059827.36	6013272.88
Jabar	984453.50	2726337.13
Jateng	960971.51	1815465.14
DI Yogya	148884.29	456193.64
Jatim	1010048.29	2135459.05
Kalbar	41256.83	416303.74
Kalteng	94881.07	114196.91
Kalsel	165296.89	343470.88
Kaltim	103092.70	1441645.13
Sulut	45733.71	333994.10
Sulteng	107196.42	300979.88
Sulsel	70046.02	693358.38
Sultra	25453.64	243407.35
Bali	51530.22	507292.36
NTB	30149.85	294289.28
NTT	33146.63	273216.75
Maluku	33330.60	250030.67
Irja	89110.55	1534331.68

Sumber: Departemen Keuangan RI. *Nota Keuangan dan RAPBN.* www.depkeu.go.id. Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa setelah pelaksanaan otonomi daerah rasio pengeluaran rutin pemerintah di masing-masing daerah terhadap PDRB mengalami peningkatan. Hal ini diperkirakan karena adanya biaya administrasi yang tentunya relatif lebih banyak, karena adanya pelimpahan wewenang yang tadinya dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang tentunya akan berdampak pada peningkatan biaya administrasi di daerah.

Kondisi peningkatan rasio belanja rutin terhadap PDRB dari masing-masing daerah harus diwaspadai. Apabila peningkatan pengeluaran tersebut tidak sebanding dengan manfaat atau pendapatan dari daerah yang bersangkutan maka secara tidak langsung pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan justru mengalami kemunduran. Oleh sebab itu, bila daerah tersebut ingin kompetitif dan tetap bertahan dibandingkan dengan daerah yang lain, maka penghematan pengeluaran rutin di berbagai pos pengeluaran harus benar-benar dilakukan sesuai dengan potensi dan kemampuan dari daerah yang bersangkutan.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui peran dan kontribusi sisi penerimaan dan sisi pengeluaran APBD terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia pada era sebelum dan sesudah Otoda periode 1994-2004. Penelitian ini menggunakan data panel 26 provinsi di Indonesia dalam periode (1994-2004). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model FEM dan GLS.

Hasil estimasi dengan metode FEM dan GLS menemukan bahwa variabel sisi penerimaan dan sisi pengeluaran APBD signifikan mempengaruhi PDRB pada era sebelum dan sesudah Otoda. Sisi pengeluaran APBD terbukti berpengaruh positif terhadap PDRB. Sedangkan variable sisi penerimaan APBD berpengaruh negative terhadap PDRB. Secara umum kontribusi positif sisi-sisi APBD terhadap PDRB mengalami penurunan pada masa Otoda dibandingkan sebelum Otoda.

4.3. Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis

4.3.1. Analisis Model

Pada bagian ini analisis ditujukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis pada tahap awal lebih difokuskan untuk mengetahui pengaruh kebijakan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika kebijakan otonomi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka analisis pada tahap selanjutnya dilakukan pemisahan antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah dengan memasukkan *dummy aditif.* Adapun hasil estimasi keseluruhan periode penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

Hasil olahan data pada Lampiran 1 diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* adalah 0,7758, artinya variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan hingga 77,58% variasi dari variabel dependennya. Hal ini didukung dengan nilai probabilitas F-statistiknya yang menunjukkan nilai 0,000 artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hingga tingkat signifkansi 1% (0,01).

Hal terpenting dalam bagian analisis ini ialah nilai t-statistik dari variabel dummy otonomi daerah. Nilai t-statistik variable otonomi daerah menunjukkan nilai sebesar -10,05413 dengan probabilitas 0,0000. Hal ini berarti bahwa otonomi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hingga tingkat signifkansi 1% (0,01), sehingga dalam penelitian ini perlu dilakukan pembedaan analisis untuk periode sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Pembedaan analisis antar periode yang lebih akurat dalam penelitian ini akan dilakukan dengan memasukkan variable *dummy multiplikatif*, yaitu dengan memasukkan perkalian variabel dummy otoda dengan variabel-variabel independen dalam model dasar. Dengan melakukan ini maka dapat diketahui apakah pengaruh variabel-variabel tersebut mengalami perubahan pada periode sebelum dan sesudah otoda, dan jika ya bagaimanakah pola perubahannya.

Adapun hasil estimasi model final penelitian ini dapat disimak pada Lampiran 3. Model final pada penelitian ini diestimasi dengan menggunakan data panel melalui pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dan bukan *Random Effect Model* (REM) dengan beberapa argumen (Widarjono, 2005 :269):

1. REM mengasumsikan bahwa sampel observasi *cross-section* dipilih secara random, sedangkan sampel pada penelitian ini menggunakan populasi (26 provinsi seluruh Indonesia).
2. REM mengasumsikan bahwa varians residual observasi *cross-section*-nya konstan (*homoscedasticity*), sedangkan uji beda varians

menunjukkan bahwa terjadi *groupwise heteroscedasticity* (lihat Lampiran 6).

3. REM mengasumsikan bahwa tidak ada korelasi antar residual dari observasi *cross-section*, sedangkan residual pada model dasar menunjukkan derajat korelasi yang tinggi antar residual observasi *cross-section* (lihat Lampiran 5).

Model final diestimasi dengan metode GLS (*cross section weight*) dan *White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance* untuk mengatasi *heteroscedasticity between* dan *within groups* di dalam model. Keberadaan korelasi serial pada residual observasi *time series*-nya diakomodasi dengan memasukkan variabel AR(1) ke dalam model. Keberadaan autokorelasi pada residual time series dapat dikonfirmasi dengan koefisien variabel AR(1) yang signifikan hingga level 1%. Dengan memasukkan variabel AR(1) ke dalam model, maka EViews 4.1 secara otomatis akan melakukan iterasi dinamis pada model, dalam kerangka autoregressif derajat pertama-AR(1), hingga bobot dan koefisien variabel independennya konvergen. Pada kasus model final pada Lampiran 3, konvergen terjadi setelah 41 iterasi.

Lampiran 3 juga menunjukan bahwa nilai *Adjusted R-squared* adalah 0,9984, artinya variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan 99,84% variasi dari variable dependennya. Demikian pula nilai probabilitas F-statistiknya yang menunjukkan nilai 0,000 artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hingga tingkat signifkansi 1% (0,01). Secara parsial semua variabel independen menunjukkan

nilai yang signifikan pada seluruh periode pada tingkat 1% hingga 5%. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilty (Prob.) variabel-variabel tersebut yang dibawah 0,05 (5%).

Model pada Lampiran 3 akan dianalisis secara terpisah untuk periode sebelum (1994-2000) dan setelah OTODA (2001-2004) untuk mempertajam analisis. Analisis akan difokuskan pada nilai dan arah dari koefisien regresi variabel bebasnya mengingat model final pada Lampiran 3 telah memenuhi kriteria-kriteria evaluasi statistik standar. Hal ini tampak dari hasil uji-t, uji-F, nilai *adj-R squared*, dan *DW-stat* yang baik.

4.3.1.1 Periode Sebelum Otonomi Daerah (1994-2000)

Analisis Pada bagian ini hanya difokuskan pada periode sebelum diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal (1994-2000). Berdasarkan Lampiran 3, hasil estimasi model data panel dengan pendekatan *fixed effect* untuk periode sebelum otonomi daerah (1994-2000) dapat diringkas dalam bentuk persamaaan sebagai berikut :

$$\text{Log (PDRB)} = (\mathbf{0.011})\ \text{Log (PAD)} + (\mathbf{-0.026})\ \text{Log (DA)} + (\mathbf{0.093})\ \text{Log (PR)} + (\mathbf{0.040})\ \text{Log (PP)}$$

Sebagaimana tampak pada Lampiran 3 semua variabel bebas secara parsial signifikan pada tingkat 5% selama periode sebelum otonomi daerah (1994-2000), Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya (Prob.) yang dibawah 0.05 (5%). Pada persamaan di atas nampak nilai koefisien semua variabel pengeluaran

pemerintah daerah menunjukkan nilai yang positif sebelum otoda dengan nilai **0,093** untuk variabel pengeluaran rutin (PR) dan **0,040** untuk pengeluaran pembangunan (PP).

Model diregresi dalam bentuk *double log,* maka secara matematis koefisien ini merupakan elastisitas, sehingga dapat diartikan sebagai berikut: kenaikan pengeluaran rutin (PR) suatu provinsi sebesar 10% akan meningkatkan PDRB provinsi tersebut sebesar 0,93%, sedangkan kenaikan pengeluaran pembangunan (PP) sebesar 10% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,4%.

Dari sisi penerimaan pemerintah provinsi, setiap kenaikan terhadap PAD sebesar 10%, membawa implikasi pada kenaikan PDRB sebesar 0,11%. Sedangkan setiap kenaikan dana alokasi (DA) suatu propinsi sebesar 10%, membawa implikasi pada turunnya PDRB propinsi tersebut sebesar 0,26%. Dapat disimpulkan bahwa selama periode sebelum diterapkannya kebijakan otonomi daerah sisi pengeluaran pemerintah dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia.

4.3.1.2 Periode Otonomi Daerah (2001-2004)

Analisis dalam bagian ini hanya difokuskan pada periode setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal (2001-2004). Adapun hasil estimasi model data panel dengan pendekatan *fixed effect* untuk periode otonomi daerah (2000-2003) dapat diringkas dalam bentuk sebagai berikut :

Log (PDRB) = (**-0.004**) Log (PAD) + (**0.026**) Log (DA) + (**0.070**) Log (PR) + (**0.021**) Log (PP)

Persamaan tersebut menunjukkan bagaimana periode otonomi daerah (2001-2004) berbeda dengan periode sebelum diterapkannya otonomi daerah (1994-2000). Selama periode diterapkannya kebijakan otonomi daerah (2001-2004), setiap kenaikan terhadap PAD sebesar 10%, membawa implikasi pada penurunan PDRB sebesar 0,04% hal ini berbeda dengan periode sebelumnya di mana PAD justru memiliki kontribusi positif terhadap PDRB. Hal serupa juga terjadi pada koefisien dana alokasi bagi provinsi (DA). Sebelum otoda DA memberikan kotribusi negatif terhadap PDRB, namun di era otonomi nilai koefisiennya berbalik tanda dari negatif menjadi positif. Kenaikan DA di era otoda sebesar 10%, justru membawa implikasi pada kenaikan PDRB sebesar 0,26%.

Sisi pengeluaran pemerintah daerah, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan tetap membawa implikasi yang positif terhadap PDRB sama seperti di era sebelum otonomi daerah. Setiap kenaikan sebesar 10% pada pengeluaran rutin (PR) membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7%, kontribusinya lebih kecil jika dibandingkan dengan selama periode sebelum kebijakan otonomi daerah. Sedangkan jika pengeluaran pembangunan (PP) dinaikkan sebesar 10% akan berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,21%. Dapat disimpulkan bahwa pada periode otoda hampir semua komponen belanja pemerintah daerah mengalami penurunan dalam kontribusi positifnya ke PDRB. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien *dummy multiplikatif* pada Lampiran 3 yang hampir seluruhnya bernilai negatif sehingga berdampak pada penurunan nilai koefisien pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap PDRB.

Peningkatan kontribusi positif terhadap PDRB hanya terjadi pada komponen PAD yang mengalami pembalikan tanda dari negatif ke positif. Hal ini menunjukkan pentingnya peran PAD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di periode otoda.

4.3.2. Pembuktian Hipotesis

1.) Hipotesis pertama terbukti, karena sisi pengeluaran APBD ternyata memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien variabel sisi pengeluaran (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) yang positif dan signifikan hingga tingkat 1%.

2.) Hipotesis ke dua terbukti, karena sisi penerimaan APBD ternyata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien variabel sisi penerimaan APBD yang negatif dan signifikan hingga tingkat 1%. Walaupun begitu komponen anggaran yang berpengaruh negatif, berbeda di era sebelum dan sesudah Otoda

3.) Hipotesis ke tiga terbukti, karena hasil uji t pada variabel *dummy* menunjukkan nilai yang signifikan hingga tingkat 1%. Artinya terdapat perbedaan kontribusi sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dalam APBD terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia pada periode sebelum dan sesudah penerapan Otonomi Daerah.

4.4. Pembahasan

Hasil temuan skripsi ini pada dasarnya menunjukkan bahwa APBD memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pegeluaran maupun penerimaan. Dari sisi pengeluaran pengaruh APBD terhadap pertumbuhan dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dana tersebut dan bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan. Sedangkan dari sisi penerimaan pengaruh APBD terhadap pertumbuhan dipengaruhi oleh bagaimana/dengan cara apa pemerintah daerah mendapatkan dana itu. Jika pemerintah meningkatkan penerimaan APBD dengan cara-cara yang mendistorsi perekonomian (misalnya, dengan menerbitkan Perda-perda mengenai pajak dan retribusi daerah yang menimbulkan *high cost* ekonomi), maka penerimaan pemerintah akan berpengaruh buruk terhadap perekonomian. Sebaliknya jika pemerintah menggunakan cara-cara yang tidak mengganggu atau justru mendorong perekonomian, maka penerimaan APBD akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan.

Berdasarkan kerangka analisis tersebut maka dapat dipahami mengapa pengeluaran pemerintah selalu berdampak positif terhadap pertumbuhan, baik di era sebelum maupun pada era otonomi daerah. Seperti diulas pada Bab 2 pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi perekonomian melalui efek multiplier. Karenanya peningkatan pengeluaran pemerintah menjadi salah satu faktor yang diharapkan

turut mendorong perekonomian, terutama di kala perekonomian sedang mengalami kelesuan seperti saat ini.

Pengeluaran pemerintah terbagi dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari secara terus menerus, sehinga mempunyai fungsi yang penting dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan, terutama dalam berbagai kegiatan pembangunan, penyediaan dan peningkatan fasilitas kerja, kapasitas serta motivasi kerja bagi segenap aparatur pemerintah. Pelaksana-pelaksana pembangunan tersebut adalah pelaksana kegiatan sehari-hari dan hasilnya sangat berguna untuk menunjang kegiatan pembangunan. Pengeluaran rutin bersifat dapat berperan lebih nyata terhadap pertumbuhan perekonomian (Suparmoko, 2003 : 79).

Variabel pengeluaran rutin dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia baik sebelum maupun pada era Otoda. Angka positif pada koefisien tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran rutin dengan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia searah. Hal ini berarti apabila pengeluaran rutin meningkat, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2000) menunjukkan variabel Pengeluaran atau konsumsi pemerintah daerah memiliki peranan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Investasi pemerintah atau pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang ciri spesifiknya adalah *investment categories*,

dimana penggunaan pembiayaan ini untuk membiayai fungsi *agent of development* dan dari pengeluaran-pengeluaran tersebut akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian selanjutnya (Achir, 1975 : 50). Investasi dari pemerintah ditujukan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan dalam satu periode tertentu dan merupakan investasi dari pemerintah untuk mendorong kegiatan produksi nasional melalui pembangunan berbagai proyek sehingga Produk Domestic bruto meningkat sesuai dengan yang direncanakan (Departemen Keuangan RI, 1996 :25).

Pada dasarnya anggaran belanja pemerintah daerah dewasa ini mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran, prioritas alokasi anggaran investasi pemerintah daerah diberikan kepada proyek-proyek produktif yang berdampak luas bagi masyarakat, karena pelaksanaanya sendiri merupakan program yang memerlukan keterlibatan partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan tersebut menyebabkan alokasi anggaran investasi pemerintah daerah lebih diprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana dasar, baik yang langsung maupun yang tak langsung berguna untuk mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan prasarana perhubungan, pengairan, kelistrikan, telekomunikasi, pendidikan perumahan, dan kesehatan.

Anggaran investasi pemerintah daerah mempunyai kaitan langsung dengan kemajuan pembangunan dan merupakan alat untuk mengukur kemampuan dan potensi suatu daerah serta sebagai alat alokasi dana atau pembiayaan untuk berabagai program dan kemudian diterapkan dalam menjalankan fungsi-fungsi

penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai, maka pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator membutuhkan anggaran belanja pemerintah dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan. Alokasi anggaran belanja pada sektor pembangunan adalah suatu kebijakan untuk mencapai sasaran dan tuuan pembangunan.

Menurut Widyastuti (2004 : 52) pengeluaran investasi pemerintah terdiri dari :

1. Belanja Publik. Belanja yang manfaatnya dinikmati langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
2. Belanja Aparatur. Belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dinikmati oleh aparatur.

Penyusunan belanja untuk investasi pemerintah daerah terhadap proyek-proyek yang akan dibangun selalu berdasarkan atas kebutuhan nyata dari masyarakat tingkat bawah. Investasi pemerintah daerah adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan menambah asset.

Variabel pengeluaran pembangunan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia baik sebelum maupun pada era Otoda. Angka positif pada koefisien tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia searah. Hal ini berarti apabila pengeluaran pembangunan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga

akan meningkat. Hasil dari penelitian sebelumnya yang mendukung skripsi ini adalah oleh Rahayu (2000), yaitu peranan sektor publik lokal dalam hal ini investasi pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan memasukkan sektor migas.

Hal yang menarik untuk dicermati dalam penelitian ini ialah bagaimana pengeluaran rutin (PR) memiliki kontribusi yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ketimbang pengeluaran pembangunan (PP) baik di era otoda maupun sebelumnya. Ada beberapa hal yang mungkin dapat menjelaskan hal ini. Pertama, pengeluaran rutin selalu memiliki pos yang lebih besar dibandingkan pengeluaran pembangunan. Hal ini dapat diperhatikan pada data APBD seluruh propinsi yang menunjukkan kecenderungan yang sama baik di periode sebelum maupun di periode otoda.

Kedua, meskipun pengeluaran pembangunan (PP) memiliki sifat investasi yang seharusnya mendorong ekonomi lebih besar ketimbang PR yang bersifat konsumsi namun ada kemungkinan dana PP selama periode sebelum otoda mengalami missalokasi atau disalahgunakan. Pendekatan *top-down planning* yang dipraktekkan di zaman itu kemungkinan membuat perencana di pusat tidak mengerti dan memahami kebutuhan, permasalahan dan potensi ekonomi di daerah. Alhasil pengeluaran pembangunan di daerah tidak dapat dialokasikan secara optimal untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini diperparah lagi dengan maraknya praktek KKN di waktu itu.

Temuan lain mengenai pengeluaran pemerintah yang patut disoroti dalam penelitian ini ialah penurunan dalam kontribusi PR dan PP terhadap PDRB pada

periode otoda. Sebelum otoda setiap 10% peningkatan kedua komponen ini berkontribusi pada kenaikan PDRB sebesar 0,93% dan 0,4%, sedangkan pada periode otoda kenaikan 10% pada keduanya hanya mendorong PDRB sebesar 0,7% dan 0,21% atau turun sebesar 0,23% dan 0,19%. Penurunan ini mungkin terjadi karena keterbatasan kemampuan SDM pemerintah daerah di Indonesia dalam mengelola ekonomi di daerahnya.

Hal ini patut dimaklumi karena selama lebih dari 30 tahun pemerintah-pemerintah ini tidak pernah memiliki pengalaman untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Semua kebijakan di masa itu diputuskan di pusat tanpa keterlibatan daerah. Pemerintah daerah tidak lebih dari kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yang hanya bertindak sesuai dengan petunjuk dan instruksi dari pusat tanpa ada ruang atau wewenang untuk berinisiatif dan berinovasi. Keterbatasan kemampuan tersebut ditambah dengan fenomea desentralisasi korupsi (legal maupun illegal) yang terjadi di era otonomi kemungkinan besar menjadi faktor utama yang menyebabkan berkurangnya kontribusi positif PP dan PR terhadap PDRB di era otoda.

Penelitian ini menemukan bahwa APBD selain dapat mendorong pertumbuhan dari sisi pengeluaran ternyata juga dapat mengambat pertumbuhan melalui sisi penerimaan. Walaupun demikian tidak semua komponen penerimaan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan. Penelitian ini menemukan ada juga komponen penerimaan yang bisa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan.

Pada periode sebelum otoda penelitian ini menemukan bahwa PAD memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan PDRB sebesar 0,11% setiap

10% peningkatan PAD. Sedangkan sebaliknya Dana Alokasi (DA) berkontribui negatif terhadap PDRB sebesar 0,26% setiap kenaikan DA sebesar 10%, menariknya di era otoda hal ini berbalik. Pengaruh positif PAD terhadap PDRB berubah menjadi negatif di era otoda, sedangkan pengaruh negatif DAU di era otoda menjadi positif setelah sebelumnya negatif. Kenaikan PAD di era otoda sebesar 10% diikuti oleh penurunan PDRB sebesar 0,04%, sedangkan kenaikan DA sebesar 10% diikuti oleh kenaikan PDRB sebesar 0,26%. Bagaimana penjelasan dibalik fenomena ini?

Pengaruh positif PAD pada era sebelum otoda menunjukkan bahwa dalam proses pengumpulannya PAD tidak menggangu aktivitas perekonomian di daerah, bahkan justru mendorong pertumbuhan. Hal ini dapat terjadi karena pada waktu itu setiap pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer dana dari pusat dalam membiayai kegiatannya, akibatnya pemerintah daerah tidak terlalu intens dalam megumpulkan PAD. PAD dikala itu dianggap sebagai sumber dana tambahan dalam menjalankan roda pemerintah sehingga pengumpulannya dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Alhasil PAD di kala itu bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan, karena semakin besar PAD suatu daerah berarti semakin besar kemampuan daerah itu untuk mendorong perekonomian daerahnya dengan program-program diluar program yang sudah digariskan pusat yang dibiayai dengan dana transfer.

Di era otoda perspektif pemerintah terhadap PAD berubah. Mereka terkesan menganggap bahwa tingkat keberhasilan suatu daerah dalam era otoda diukur dari kemampuannya dalam mengumpulkan PAD, karena PAD dianggap

sebagai ukuran kemandirian fiskal. Sebenarnya pandangan ini sah-sah saja yang sayangnya dalam proses pengumpulan PAD masing-masing daerah melakukannya dengan jalan pintas, yaitu dengan mengeluarkan perda-perda yang berisi bermacam retribusi, pajak dan pungutan kepada pengusaha. Akibatnya perda-perda ini menghambat iklim usaha di daerah (Ray,2003). Hal ini menjelaskan mengapa pengaruh PAD berubah menjadi negatif terhadap PDRB di era otoda.

Bagaimana dengan Dana Alokasi (DA)?. Kenyataan bahwa Dana Alokasi negatif di era sebelum otoda mengindikasikan bahwa dana alokasi di era otoda ternyata medistorsi perekonomian. Hal ini mungkin terjadi karena keterbatasan pengetahuan pemerintah pusat akan kondisi dan permasalahan di daerah mengakibatkan pemerintah pusat tidak mengalokasikan dana ini secara benar (tepat sasaran) sesuai kebutuhan dan permasalahan daerah sehingga justru malah menghambat (mendistorsi) pertumbuhan di daerah.

Di era otoda formulasi pembagian Dana Alokasi disempurnakan sehinga lebih mengakomodasi kebutuhan daerah dengan digunakannya konsep *fiscal need*, *fiscal capacity* dan *fiscal gap* dalam menentukan besaran DA yang diterima suatu daerah. Konsep alokasi DA yang lebih baik dan juga kenyataan bahwa dana ini merupakan salah satu bentuk dana transfer yang dalam proses pengumpulannya tidak mendistorsi perekonomian mungkin menjadi faktor yang menjelaskan mengapa DA memilki kontribusi positif terhadap PDRB di era otoda, setelah di era sebelumnya justru menghambat pertumbuhan di daerah.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari uraian-uraian dalam pembahasan sebelumnya dan berdasar atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh beberapa simpulan, di antaranya :

1. Sisi penerimaan dan sisi pengeluaran APBD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Secara umum sisi pengeluaran memiliki kontribusi positif terhadap PDRB sedangkan sisi penerimaan cenderung memiliki dampak negatif
3. Pada era otonomi daerah kontribusi positif APBD terhadap PDRB berkurang, baik dari sisi pengeluaran maupun penerimaan. Hanya Dana Alokasi (DA) yang justru mengalami peningkatan drastis dalam kontribusi positifnya terhadap PDRB
4. Sebelum otonomi DA berkontribusi negatif terhadap PDRB yang kemudian berbalik menjadi positif di era otoda. Hal ini nampaknya disebabkan oleh formulasi alokasi DA yang lebih baik di era otoda, dengan tidak mendistorsi perekonomian dan lebih mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan daerah.
5. PAD memiliki kontribusi positif di era sebelum otoda, namun berbalik menjadi negatif di era otoda. Hal ini terjadi karena di era otoda pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan PAD nya

otoda pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan PAD nya dengan cara menerbitkan perda-perda yang berisi berbagai bermacam retribusi, pajak dan pungutan yang justru mengganggu iklim usaha di daerahnya. Hal ini bersumber dari perspektif pemeritah daerah yang menjadikan PAD sebagai tolok ukur keberhasilannya dalam mengelola daerahnya.

6. Pengeluaran pembangunan (PP) dan pengeluaran rutin (PP) memiliki pengaruh positif terhadap PDRB di sebelum dan pada periode otoda. Namun pengaruh positifnya berkurang di era otoda. Keterbatasan kapasitas banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam mengelola ekonomi di daerahnya dan adanya fenomena desentralisasi korupsi (legal maupun illegal) yang terjadi di era otonomi kemungkinan besar menjadi faktor yang bertanggung jawab terhadap berkurangnya kontribusi positif PP dan PR terhadap PDRB di era otoda.

5.2. Saran

1. Pemerintah daerah seharusnya melakukan evaluasi dan audit terhadap kinerja pos pengeluaran pembangunan pada APBD. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena berdasarkan konsep ekonomi pengeluaran pembangunan inilah yang seharusnya mampu mendorong PDRB lebih cepat dari pengeluaran rutin, karena pengeluaran di pos-pos ini pada dasarnya merupakan

investasi pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik melalui penerapan *good corporate government* agar pengeluaran pemerintah daerah bisa secara efektif mendorong laju pertumbuhan di daerah mengingat masih lesunya perekonomian dewasa ini akibat minimnya investasi di sektor riil oleh pihak swasta.

2. Sebagai gantinya pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan PAD dengan melakukan insentif fiskal dengan cara misalnya adanya intensifikasi pajak didaerahnya masing-masing (hal ini secara relatif tidak akan memberatkan pengusaha di daerah karena tidak menambah beban pajak bagi para pengusaha).
3. Untuk menarik investor ke daerah, Pemda sebaiknya mulai mengatasi ekonomi biaya tinggi di daerahnya dengan cara mengurangi biaya-biaya administrasi yang tidak perlu, terutama biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan hanya untuk meningkatkan PAD tanpa ada kompensasi yang dapat secara langsung dinikmati pengusaha.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Achir, Azmy,1975. *Masalah Pengurusan Keuangan Negara*. Bandung : CV Yulianti.

Arsyad, Lincolin, 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Abipraja, Soedjono,1993.*Ekonomi pembangunan Pengantar dan Kebijaksanaan.*. Surabaya.: Airlangga University Press

Arif, Sritua, 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta : UII Press.

Arifin, Zaenal, 2005. *Analisis Efektifitas Penerapan Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1995-2003 (Kuartal I-IV)*.Skripsi. Tidak Dipublikasikan.

Aviliani, Z Arifin dan A gunardi, 2005. *Mitos Konsolidasi Fiskal (Prospek Ekonomi dan Bisnis Indonesia 2005)*. INDEF. Data tidak dipublikasikan

Aschauer, D. A, 2000. *Public Capital and Ekonomic Growth: Issues of Quantity, Finance, and Efficiency*. Economic Development and Cultural Change 48 (2): 391 – 406.

Badan Analisis Fiskal. 2004. Kebijakan Fiskal : *Pemikiran Konsep dan Implementasi*. Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan. Jakarta.

Badan Analisa Fiskal dan Japan International Cooperation Agency. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Fiskal*. Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan. Jakarta.

Baffes, J., dan A. Shah, 1998. *Productivity of Publik Spending, Sectoral Allocation Choices, and Economic Growth*. Economic development and Cultural Change 46(2) :291-303.

Bank Indonesia, Berbagai Tahun Penerbitan. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Jakarta.

Basri, Yuswar Z dan Mulyadi Sabri. 2003. *Keuangan Negara dan Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.

Bergstorm, F, 1998. *Regional Policy and Convergence of Real Per Capita Income Among Swedish Countries*. SSE/EFI Working Paper Series in Economic Development and Finance No.284, Nopember 1998.

Boediono, 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi Kelima. Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada.

Boyes, William J. 1992. *Macroeconomics : Intermediate Theory & Policy*. Third edition, South-Western Publishing Co.

Brata, A.G., dan Z Arifin, 2003. Alokasi Investasi Sektor Publik dan Pengaruhnya Terhadap Konvergesi Ekonomi Regional di Indonesia. *Media ekonomi* 13(20): 57-71.

Brata, Aloysius G. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Departemen Keuangan Republik Indonesia.. *Nota Keuangan dan RAPBN*. www.depkeu.go.id. diakses 12 april 2006.

_____. 1996. *Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1996/1997*. Percetakan Negara Republik Indonesia.

Desus, S., dan R. Herrera, 2000. Public capital and Growth Revisited: A Panel Data Assesment. Economic Development and Cultural Change 48(2) : 407-418.

Djojohadikusumo, Sumitro, 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*, Edisi III. BPFE : Yogyakarta.

Firdiana, Halida, 2004. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah 1995/1996-2002*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.

Hari Adi, Priyo, 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, Vol XVII, NO. 2-3, 2005 : 135-158.

Gujarati, Damodar N, 2003. *Basic Econometrics*. Fourth Edition. New York : McGraw Hill

Gupta, S., B. Clements, E. Baldacci, dan C. Mulas-Granados, 2002. *Expenditure Composition, Fiskal Adjustment, and Growth*. IMF Working Paper 02/77.

Jhinghan, M. L, 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Diterjemahkan oleh D. Guritno. Edisi Kesepuluh. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, M., 1995. Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan. *Prisma* 4 : 3-17.

Kerjasama Laboratorium FE UI dan Direktorat Pendidikan Tinggi 2005. *Modul Pelatihan Ekonometrika Dasar*. Kerjasama Laboratorium FE UI dan Direktorat Pendidikan Tinggi. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Lall, Somik V., dan Serdar Yilmaz, 2000. *Regional Economic Convergence: Do Policy Instruments Make a Difference*. The Institute of Publik Policy, Goerge Mason University.

Mankiw, N. Gregory, 2000. *Teori Makro Ekonomi.* Terjemahan. Edisi Empat. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Pindyck, Robert S. 1998. Daniel L, Rubinfield, *Econometric Models and Economic Forecasting*, 4rd Edition. New York : Mc Graw-Hill

Quantitatif Micro Soft Ware, 2002. *Eviews 4.1. User Guide*. Quantitatif Micro Soft Ware. LLC. United States of America

Rahayu, Siti Aisyah Tri, 2000. Peranan Sektor Publik Lokal dan Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Kesenjangan yang terjadi di Indonesia, *Empirika*, 2000: 1-21, Nomor 27.

Rahmi, Vembri Aulia. 2005. *Analisis kemampuan Keuangan daerah Kabupaten Gresik Menghadapi Otonomi Daerah di era Globalisasi*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.

Rappaport, J., 1999a. *Local Growth Theory*. CID Working Paper No. 19, Juni 1999.

Rappaport, J., 1999b. *Local Growth Empirics*. CID Working Paper No. 23, Juli 1999.

Ray, David, 2003. *Decentralization, Regulary Reform and the Business Climate*. Jakarta : PEG.

Sach and Larrain, 1993. *Maccroeconomics in The Global Economy*. Prentice Hall, Inc. New Jersey.

Samuelson & William Nordhaus,1994. *Makroekonomi*, Edisi keempatbelas.Terjemahan. Erlangga, Jakarta

_____,1999. *Economics*. Singapore : McGraw Hill.

Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Hingga Keynesian Baru*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Suparmoko, M, 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Penerbit ANDI.

Suparmoko, M dan Irawan, 2003. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keenam, Yogyakarta: BPFE.

Todaro, Michael P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 Edisi Ketujuh. Bumi Aksara.

Widarjono, Agus, 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : Ekonosia Fakultas Ekonomi UII.

Widyastuti, Tika, 2005. *Analisis Peranan Sektor Publik Lokal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa Timur periode 1996-2003*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.

LAMPIRAN 1

REGRESI MODEL AWAL

Hasil Estimasi Model Awal

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/25/06 Time: 01:46
Sample: 1994 2004
Included observations: 11
Number of cross-sections used: 26
Total panel (balanced) observations: 286

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.083687	0.440271	11.54672	0.0000
LOG(PAD?)	0.242347	0.044154	5.488723	0.0000
LOG(DA?)	0.014507	0.036036	0.402561	0.6876
LOG(PR?)	0.492109	0.063945	7.695792	0.0000
LOG(PP?)	0.187218	0.069023	2.712399	0.0071
OTODA?	-0.901355	0.089674	-10.05143	0.0000

R-squared	0.779707	Mean dependent var	15.90923
Adjusted R-squared	0.775773	S.D. dependent var	1.106904
S.E. of regression	0.524148	Sum squared resid	76.92474
F-statistic	198.2065	Durbin-Watson stat	0.403306
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 2

REGRESI MODIFIKASI MODEL AWAL

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
Method: GLS (Cross Section Weights)
Date: 07/22/06 Time: 14:02
Sample: 1994 2004
Included observations: 11
Number of cross-sections used: 26
Total panel (balanced) observations: 260
Convergence not achieved after 500 iterations
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PAD?)	0.004369	0.004607	0.948408	0.3439
LOG(DA?)	-0.025730	0.001114	-23.09150	0.0000
LOG(PR?)	0.093887	0.002355	39.86425	0.0000
LOG(PP?)	0.045718	0.008770	5.212936	0.0000
OTODA?	0.041931	0.071686	0.584926	0.5592
LOG(PAD?)*OTODA?	-0.009177	0.005457	-1.681646	0.0940
LOG(DA?)*OTODA?	0.051861	0.002465	21.04113	0.0000
LOG(PR?)*OTODA?	-0.023271	0.007410	-3.140291	0.0019
LOG(PP?)*OTODA?	-0.028568	0.008668	-3.295656	0.0011
AR(1)	0.880066	0.003623	242.9263	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH--C	14.44299			
_SUMUT--C	15.75110			
_SUMBAR--C	14.67998			
_RIAU--C	15.53216			
_JAMBI--C	13.86125			
_SUMSEL--C	15.04821			
_BENGKULU--C	13.19330			
_LAMPUNG--C	14.71151			
_JAKARTA--C	16.34136			
_JABAR--C	16.39102			
_JATENG--C	16.13907			
_YOGYA--C	14.18016			
_JATIM--C	16.51369			
_KALBAR--C	14.56533			
_KALTENG--C	14.15209			
_KALSEL--C	14.54957			
_KALTIM--C	15.54375			
_SULUT--C	13.87052			
_SULTENG--C	13.62411			
_SULSEL--C	14.88188			
_SULTRA--C	13.22725			
_BALI--C	14.57102			
_NTB--C	14.26011			
_NTT--C	13.79303			
_MALUKU--C	12.66587			
_IRJA--C	14.69872			

Weighted Statistics			
R-squared	0.999999	Mean dependent var	30.44841
Adjusted R-squared	0.999999	S.D. dependent var	46.26100
S.E. of regression	0.045349	Sum squared resid	0.460672
F-statistic	7700470.	Durbin-Watson stat	2.003055
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.998581	Mean dependent var	15.92727
Adjusted R-squared	0.998359	S.D. dependent var	1.103456
S.E. of regression	0.044702	Sum squared resid	0.447608
Durbin-Watson stat	2.042715		

LAMPIRAN 3

REGRESI MODEL FINAL

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
Method: GLS (Cross Section Weights)
Date: 07/22/06 Time: 14:22
Sample: 1994 2004
Included observations: 11
Number of cross-sections used: 26
Total panel (balanced) observations: 260
Convergence achieved after 41 iterations
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PAD?)	0.010530	0.004356	2.417486	0.0164
LOG(DA?)	-0.025563	0.000566	-45.13734	0.0000
LOG(PR?)	0.093277	0.001081	86.30794	0.0000
LOG(PP?)	0.039618	0.003080	12.86232	0.0000
LOG(PAD?)*OTODA?	-0.014789	0.005404	-2.736856	0.0067
LOG(DA?)*OTODA?	0.051202	0.000889	57.57711	0.0000
LOG(PR?)*OTODA?	-0.023195	0.005033	-4.608585	0.0000
LOG(PP?)*OTODA?	-0.018987	0.003178	-5.975165	0.0000
AR(1)	0.882574	0.001718	513.5738	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH--C	14.43974			
_SUMUT--C	15.78011			
_SUMBAR--C	14.70694			
_RIAU--C	15.54613			
_JAMBI--C	13.88557			
_SUMSEL--C	15.06580			
_BENGKULU--C	13.21664			
_LAMPUNG--C	14.74736			
_JAKARTA--C	16.34639			
_JABAR--C	16.40585			
_JATENG--C	16.16115			
_YOGYA--C	14.20490			
_JATIM--C	16.53054			
_KALBAR--C	14.59052			
_KALTENG--C	14.18442			
_KALSEL--C	14.58038			
_KALTIM--C	15.55795			
_SULUT--C	13.90733			
_SULTENG--C	13.65868			
_SULSEL--C	14.90666			
_SULTRA--C	13.25637			
_BALI--C	14.59570			
_NTB--C	14.30279			
_NTT--C	13.82382			
_MALUKU--C	12.66428			
_IRJA--C	14.72057			

Weighted Statistics			
R-squared	1.000000	Mean dependent var	43.38104
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var	112.0695
S.E. of regression	0.044680	Sum squared resid	0.449164
F-statistic	47926203	Durbin-Watson stat	2.145388
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.998576	Mean dependent var	15.92727
Adjusted R-squared	0.998360	S.D. dependent var	1.103456
S.E. of regression	0.044680	Sum squared resid	0.449164
Durbin-Watson stat	2.050795		

LAMPIRAN 4

GRAFIK RESIDUAL OBSERVASI CROSS-SECTION

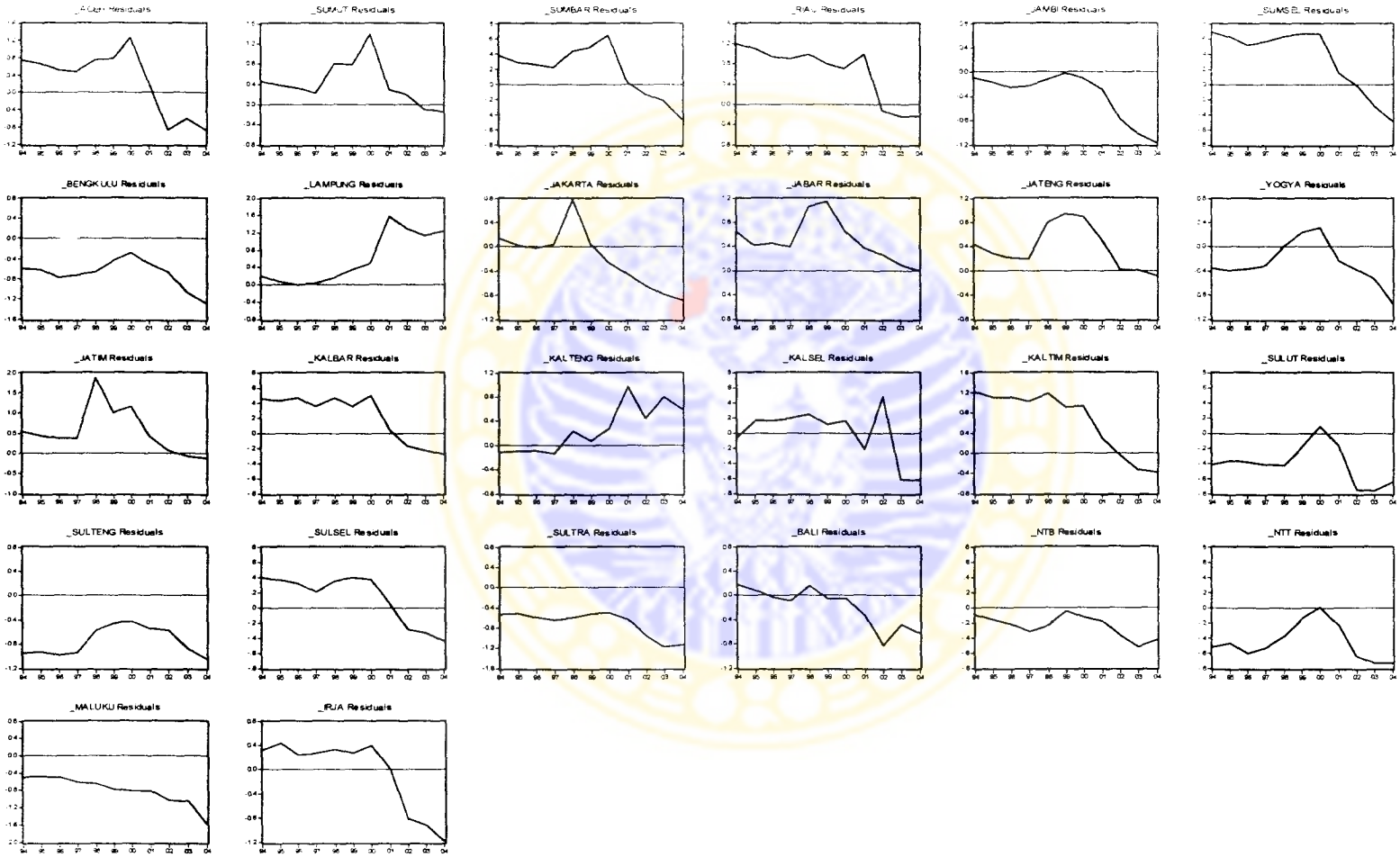
_ACEH Residuals
_SUMUT Residuals
_SUMBAR Residuals
_RIAU Residuals
_JAMBI Residuals
_SUMSEL Residuals
_BENGKULU Residuals
_LAMPUNG Residuals
_JAKARTA Residuals
_JABAR Residuals
_JATENG Residuals
_YOGYA Residuals
_JATIM Residuals
_KALBAR Residuals
_KALTENG Residuals
_KALSEL Residuals
_KALTIM Residuals
_SULUT Residuals
_SULTENG Residuals
_SULSEL Residuals
_SULTRA Residuals
_BALI Residuals
_NTB Residuals
_NTT Residuals
_MALUKU Residuals
_IRJA Residuals

LAMPIRAN 5

MATRIKS KORELASI RESIDUAL OBSERVASI CROSS-SECTION

Residual Correlation Matrix

	RES_ ACH	RES_ SUT	RES_ SMBR	RES_ RIAU	RES_ JAMBI	RES_ SMSEL	RES_ BNGKLU	RES_ LMPNG	RES_ JKRT	RES_ JBAR	RES_ JTENG	RES_ YGYA	RES_ JATIM	RES_ KALBR
RES_ACH	1	0.829	0.961	0.864	0.939	0.935	0.766	-0.725	0.76	0.75	0.812	0.766	0.745	0.955
RES_SUT	0.829	1	0.891	0.525	0.748	0.743	0.831	-0.422	0.55	0.77	0.906	0.916	0.831	0.732
RES_SMBR	0.961	0.891	1	0.782	0.936	0.957	0.84	-0.719	0.77	0.84	0.848	0.865	0.794	0.936
RES_RIAU	0.864	0.525	0.782	1	0.931	0.884	0.666	-0.666	0.8	0.63	0.597	0.5	0.57	0.888
RES_JAMBI	0.939	0.748	0.936	0.931	1	0.972	0.847	-0.683	0.81	0.8	0.785	0.76	0.712	0.933
RES_SMSEL	0.935	0.743	0.957	0.884	0.972	1	0.789	-0.812	0.85	0.79	0.72	0.728	0.705	0.971
RES_BNGKL	0.766	0.831	0.84	0.666	0.847	0.789	1	-0.307	0.49	0.68	0.798	0.872	0.616	0.687
RES_LMPNG	-0.73	-0.42	-0.72	-0.67	-0.68	-0.812	-0.307	1	-0.79	-0.55	-0.348	-0.35	-0.482	-0.861
RES_JKRT	0.759	0.549	0.772	0.797	0.81	0.847	0.487	-0.792	1	0.82	0.622	0.536	0.815	0.851
RES_JABR	0.754	0.766	0.835	0.629	0.8	0.787	0.68	-0.55	0.82	1	0.9	0.827	0.892	0.729
RES_JATNG	0.812	0.906	0.848	0.597	0.785	0.72	0.798	-0.348	0.62	0.9	1	0.926	0.88	0.678
RES_YGYA	0.766	0.916	0.865	0.5	0.76	0.728	0.872	-0.347	0.54	0.83	0.926	1	0.795	0.653
RES_JATIM	0.745	0.831	0.794	0.57	0.712	0.705	0.616	-0.482	0.82	0.89	0.88	0.795	1	0.706
RES_KALBR	0.955	0.732	0.936	0.888	0.933	0.971	0.687	-0.861	0.85	0.73	0.678	0.653	0.706	1
RES_KLTNG	-0.6	-0.32	-0.62	-0.59	-0.62	-0.756	-0.309	0.934	-0.66	-0.44	-0.209	-0.23	-0.293	-0.767
RES_KLSEL	0.457	0.526	0.616	0.456	0.623	0.682	0.676	-0.497	0.57	0.52	0.384	0.557	0.484	0.587
RES_KLTIM	0.908	0.642	0.894	0.911	0.932	0.973	0.651	-0.882	0.89	0.73	0.617	0.584	0.671	0.985
RES_SULUT	0.836	0.818	0.768	0.668	0.766	0.669	0.793	-0.3	0.38	0.56	0.809	0.759	0.58	0.682
RES_SLTNG	0.315	0.691	0.452	0.101	0.372	0.275	0.707	0.211	0.16	0.58	0.741	0.815	0.6	0.158
RES_SULSL	0.966	0.738	0.947	0.92	0.973	0.979	0.75	-0.799	0.84	0.79	0.747	0.702	0.708	0.98
RES_SULTR	0.929	0.734	0.903	0.941	0.984	0.948	0.834	-0.664	0.76	0.74	0.744	0.697	0.66	0.927
RES_BALI	0.904	0.579	0.829	0.881	0.848	0.877	0.495	-0.841	0.86	0.69	0.621	0.502	0.668	0.928
RES_NTB	0.84	0.727	0.826	0.825	0.897	0.832	0.823	-0.492	0.61	0.76	0.791	0.685	0.597	0.789
RES_NTT	0.75	0.883	0.759	0.526	0.716	0.614	0.855	-0.162	0.37	0.69	0.919	0.894	0.695	0.565
RES_MALK	0.763	0.426	0.759	0.874	0.851	0.875	0.624	-0.743	0.76	0.54	0.421	0.474	0.442	0.853
RES_RUA	0.958	0.707	0.924	0.949	0.981	0.971	0.774	-0.758	0.82	0.72	0.712	0.687	0.678	0.967

Residual Correlation Matrix (cont.)

	RES_ KLTNG	RES_ KLSEL	RES_ KLTIM	RES_ SULUT	RES_ SLTNG	RES_ SULSL	RES_ SULTR	RES_ BALI	RES_ NTB	RES_ NTT	RES_ MALKU	RES_ IRJA
RES_ACH	-0.6	0.457	0.908	0.836	0.315	0.966	0.929	0.904	0.84	0.75	0.763	0.958
RES_SUT	-0.32	0.526	0.642	0.818	0.691	0.738	0.734	0.579	0.727	0.883	0.426	0.707
RES_SMBR	-0.62	0.616	0.894	0.768	0.452	0.947	0.903	0.829	0.826	0.759	0.759	0.924
RES_RIAU	-0.59	0.456	0.911	0.668	0.101	0.92	0.941	0.881	0.825	0.526	0.874	0.949
RES_JAMBI	-0.62	0.623	0.932	0.766	0.372	0.973	0.984	0.848	0.897	0.716	0.851	0.981
RES_SMSEL	-0.76	0.682	0.973	0.669	0.275	0.979	0.948	0.877	0.832	0.614	0.875	0.971
RES_BNGKL	-0.31	0.676	0.651	0.793	0.707	0.75	0.834	0.495	0.823	0.855	0.624	0.774
RES_LMPNG	0.93	-0.5	-0.88	-0.3	0.211	-0.799	-0.66	-0.84	-0.49	-0.162	-0.74	-0.758
RES_JKRT	-0.66	0.574	0.892	0.375	0.159	0.837	0.76	0.862	0.605	0.369	0.759	0.82
RES_JABR	-0.44	0.524	0.726	0.561	0.578	0.787	0.736	0.691	0.755	0.687	0.536	0.722
RES_JATNG	-0.21	0.384	0.617	0.809	0.741	0.747	0.744	0.621	0.791	0.919	0.421	0.712
RES_YGYA	-0.23	0.557	0.584	0.759	0.815	0.702	0.697	0.502	0.685	0.894	0.474	0.687
RES_JATIM	-0.29	0.484	0.671	0.58	0.6	0.708	0.66	0.668	0.597	0.695	0.442	0.678
RES_KALBR	-0.77	0.587	0.985	0.682	0.158	0.98	0.927	0.928	0.789	0.565	0.353	0.967
RES_KLTNG	1	-0.58	-0.82	-0.213	0.271	-0.711	-0.63	-0.69	-0.51	-0.071	-0.68	-0.666
RES_KLSEL	-0.58	1	0.627	0.279	0.41	0.558	0.61	0.309	0.463	0.348	0.588	0.58
RES_KLTIM	-0.82	0.627	1	0.592	0.094	0.97	0.923	0.923	0.777	0.48	0.383	0.96
RES_SULUT	-0.21	0.279	0.592	1	0.526	0.727	0.8	0.572	0.805	0.926	0.43	0.748
RES_SLTNG	0.27	0.41	0.094	0.526	1	0.237	0.321	-0.01	0.399	0.786	0.032	0.242
RES_SULSL	-0.71	0.558	0.97	0.727	0.237	1	0.963	0.927	0.873	0.639	0.86	0.982
RES_SULTR	-0.63	0.61	0.923	0.8	0.321	0.963	1	0.827	0.927	0.711	0.317	0.972
RES_BALI	-0.69	0.309	0.923	0.572	-0.011	0.927	0.827	1	0.715	0.446	0.608	0.901
RES_NTB	-0.51	0.463	0.777	0.805	0.399	0.873	0.927	0.715	1	0.762	0.535	0.839
RES_NTT	-0.07	0.348	0.48	0.926	0.786	0.639	0.711	0.446	0.762	1	0.317	0.648
RES_MALK	-0.68	0.588	0.893	0.43	0.032	0.86	0.817	0.808	0.535	0.317	1	0.887
RES_IRJA	-0.67	0.58	0.96	0.748	0.242	0.982	0.972	0.901	0.839	0.648	0.887	1

LAMPIRAN 6

UJI BEDA VARIANS RESIDUAL OBSERVASI CROSS-SECTION

Test for Equality of Variances Between Series
Date: 07/22/06 Time: 13:27
Sample: 1994 2004
Included observations: 11

Method	df	Value	Probability
Bartlett	25	61.91151	0.0001
Levene	(25, 260)	3.353442	0.0000
Brown-Forsythe	(25, 260)	1.192440	0.2456

Category Statistics

Variable	Count	Std. Dev.	Mean Abs. Mean Diff.	Mean Abs. Median Diff.
RESID_ACEH	11	0.730837	0.592592	0.534577
RESID_SUMUT	11	0.438655	0.320014	0.304491
RESID_SUMBAR	11	0.336828	0.271768	0.254746
RESID_RIAU	11	0.557962	0.460351	0.393658
RESID_JAMBI	11	0.402643	0.327596	0.271988
RESID_SUMSEL	11	0.427043	0.362250	0.309475
RESID_BENGKULU	11	0.278157	0.196317	0.188022
RESID_LAMPUNG	11	0.593091	0.519366	0.479360
RESID_JAKARTA	11	0.482697	0.382504	0.367782
RESID_JABAR	11	0.357799	0.272843	0.257181
RESID_JATENG	11	0.365711	0.301937	0.293447
RESID_YOGYA	11	0.352233	0.254947	0.237835
RESID_JATIM	11	0.588319	0.431739	0.398255
RESID_KALBAR	11	0.310571	0.272027	0.235526
RESID_KALTENG	11	0.393077	0.318346	0.315488
RESID_KALSEL	11	0.351576	0.275547	0.240845
RESID_KALTIM	11	0.629843	0.549670	0.471475
RESID_SULUT	11	0.256792	0.183277	0.181939
RESID_SULTENG	11	0.239116	0.219667	0.208453
RESID_SULSEL	11	0.327134	0.276286	0.244660
RESID_SULTRA	11	0.254047	0.207416	0.170600
RESID_BALI	11	0.332319	0.275352	0.244207
RESID_NTB	11	0.144508	0.116333	0.112437
RESID_NTT	11	0.240824	0.192404	0.183120
RESID_MALUKU	11	0.329949	0.234636	0.233066
RESID_IRJA	11	0.602249	0.497510	0.402834
All	286	0.606055	0.319719	0.289826

Bartlett weighted standard deviation: 0.421386